

**PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH TERHADAP  
PEREKONOMIAN DAERAH DI ERA DESENTRALISASI FISKAL**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**IWAN RICHARD BUTARBUTAR  
6605290185**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Iwan Richard Butarbutar**

**NPM : 6605290185**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 6 Januari 2009**

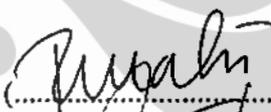
## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Iwan Richard Butarbutar  
NPM : 6605290185  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era  
Desentralisasi Fiskal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

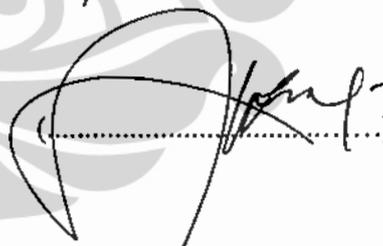
Pembimbing : Dr. B. Raksaka Mahi, M.Sc.

  
(.....)

Penguji : Niniek L. Gyat, S.E., M.Soc.Sc.

  
(.....)

Penguji : Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc.

  
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemerintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan studi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Penulis mengajukan Tesis dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal”**.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karuniaNya yang melimpah kepada Penulis dari sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatian, yaitu:

1. Bapak Dr. B. Raksaka Mahi, M.Sc. selaku dosen pembimbing dan sekaligus Ketua Program MPKP, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan semangat selama penulisan Tesis ini.
2. Bapak Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc. dan Ibu Niniek L. Gyat, S.E., M.Soc.Sc. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan saran dan kritik bagi penyempurnaan tesis ini.
3. Para dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai selama masa perkuliahan.
4. Seluruh staf sekretariat Program MPKP terutama Mas Haris dan Mas Dedi yang telah membantu pengurusan administrasi perkuliahan.
5. Isteriku tercinta Vera Purba dan anak-anakku tersayang, Imelda Theresia dan Christopher Martua, atas segala kesabaran, dorongan, dan doanya.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Drs. M. Butarbutar dan Ibu R. Tampubolon, yang tidak pernah berhenti memberi perhatian dan dorongan untuk selalu menjadi yang lebih baik dalam semua hal.

7. Kedua mertuaku di Medan, Bapak H. Purba dan Ibu L. Simatupang yang selalu menanyakan kemajuan penulisan tesis.
8. Bapak Prof. Dr. Mardiasmo, Ak., MBA selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, yang selalu memberikan arahan dan dorongan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kapasitas yang dimilikinya.
9. Bapak Adriansyah, Bapak Yusrizal Amir, dan Bapak Sugiyarto selaku atasan Penulis, yang selalu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam mencapai prestasi kerja yang lebih baik.
10. Pak Risdi, Mas Dudi, Denny, Tarto, Yusuf, Surya, Sofiahana, Heri, dan Rina, atas dukungan yang diberikan selama pengerjaan tesis ini.
11. Bapak Edison Sihombing, Bapak Berlin Panjaitan, Bang Anggiat Sitanggang, Bang Lisbon Sirait, Mas Gama, Mas Nugroho, Putut, Gustaf, Anwar, Jackwin, Prasetyo, Dony, dan Ikhsan atas saran-saran dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh rekan-rekan kerja Penulis pada Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan.
13. Rekan-rekan MPKP angkatan XIII dan XIV sore atas persahabatan dan kebersamaan kita selama menjalani perkuliahan.
14. Terutama kepada Dian dan Yasir atas bantuan yang tak ternilai selama pengerjaan tesis ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan kiranya Tesis ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya bagi para pengambil kebijakan yang terkait dengan perekonomian daerah.

Depok, 6 Januari 2009

Penulis,



Iwan Richard Butarbutar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Richard Butarbutar  
NPM : 6605290185  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 6 Januari 2009  
Yang Menyatakan,



(Iwan Richard Butarbutar)

# PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH DI ERA DESENTRALISASI FISKAL

## ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu modal dan tenaga kerja. Realisasi belanja modal pemerintah diasumsikan sebagai investasi pemerintah yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal.

Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data lengkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Regresi data menggunakan metode kwadrat terkecil atau *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Parameter yang diestimasi kemudian diuji dengan kriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik.

Hasil regresi menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap PDRB. Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah ternyata lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di atas rata-rata memiliki pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota lebih besar dari pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Di sisi lain, tenaga kerja memiliki pengaruh yang relatif besar dan dominan terhadap PDRB.

## **IMPACT OF GOVERNMENT CAPITAL SPENDING TO LOCAL ECONOMY IN THE DECENTRALIZATION ERA**

### **ABSTRACTION**

The economic growth could be observed through production function approach, as an example, Akai, Nishimura, and Sakata (2004). Production function itself influenced by contribution of the main production factor, those are capital and labor. The realization of government capital spending assumed as government investment that would stronger the local economy growth by inviting more input for the production process. The objectives of this research are to overview the impact of government capital spending and other factors to the local economy growth in the decentralization era.

The observation involved 316 cities/regions which have comprehensive data on research variables, as needed. Research analysis would have quantitative approach which supported by qualitative approach. Data regression using Ordinary Least Square (OLS) is executed by Eviews 4.1. The estimated parameter then tested by economic criteria, statistic criteria, and econometric criteria.

The result of regression indicates that the central government capital spending and local government capital spending has relatively small impact to GDRP. Nevertheless, in fact the realization on local government capital spending has bigger impact then the central government capital spending. It indicates that the local government is more efficient in allocate the capital spending compare then the central government. Mean while, for the local government which realized their revenue sharing fund above average, the local government capital spending has bigger impact to GDRP, then the central government capital spending as a whole. In other side, labor has relatively bigger and dominant impact to GDRP.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACTION .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Metodologi Penelitian .....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
1.7. Kerangka Pikir .....	10
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Konsepsi Desentralisasi Fiskal .....	11
2.2. Desentralisasi Fiskal di Indonesia .....	18
2.3. Belanja Pemerintah di Indonesia .....	21
2.4. Konsepsi Pertumbuhan Ekonomi .....	26
2.5. Hasil Kajian Terdahulu .....	29
<b>3. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>31</b>
3.1. Profil Desentralisasi Fiskal di Indonesia .....	31
3.2. Profil Perekonomian Daerah .....	33
3.3. Profil Belanja Pemerintah Pusat .....	37
3.4. Profil Belanja Pemerintah Daerah .....	39
3.5. Profil Dana Bagi Hasil .....	41
<b>4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Konsepsi Ekonometrika .....	43
4.2. Hasil Estimasi Model .....	46
4.3. Analisis Hasil Estimasi Model .....	51

<b>5. PENUTUP</b> .....	54
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran .....	55

<b>6. DAFTAR REFERENSI</b> .....	57
----------------------------------	----

**7. LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi Tahun 2001-2006 .....	35
Tabel 3.2. PDRB Kabupaten/Kota Harga Berlaku Tertinggi Tahun 2006 .....	36
Tabel 3.3. PDRB Kabupaten/Kota Harga Berlaku Terendah Tahun 2006 .....	36
Tabel 3.4. Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Tahun 2005-2006 .....	38
Tabel 3.5. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun 2005 dan 2006 .....	39
Tabel 3.6. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Tertinggi Tahun 2005 .....	40
Tabel 3.7. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Terendah Tahun 2005 .....	40
Tabel 3.8. Sebaran Realisasi Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Tahun 2005 .....	41
Tabel 3.9. Realisasi Dana Bagi Hasil Tertinggi Tahun 2005 .....	42
Tabel 3.10. Realisasi Dana Bagi Hasil Terendah Tahun 2005 .....	42
Tabel 4.1. Hasil Regresi Model Tahap Pertama .....	48
Tabel 4.2. Hasil Analisis Conditon Index (CI) .....	49
Tabel 4.3. Hasil Regresi Model Tahap Kedua .....	50

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1999, sistem pemerintahan di Indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi tersebut diwujudkan melalui pemberian peran yang lebih besar kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri secara nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menambah kewenangan dan akuntabilitas dari aparat daerah. Pengambilan keputusan di tingkat lokal akan lebih mendorong rasa tanggung jawab, meningkatkan rasa kepemilikan, dan tentunya memberikan insentif kepada aparat daerah. Hal ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa dengan memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah, maka kualitas dan efisiensi dari layanan publik dapat menjadi lebih baik (Bardhan, 1997).

Namun demikian, hasil kajian empirik tentang desentralisasi yang memberi kesimpulan sebaliknya juga tidak sedikit. Desentralisasi ternyata bukanlah obat mujarab yang sekali diluncurkan bisa menyelesaikan banyak persoalan publik. Ada banyak permasalahan yang justru mengakibatkan buruknya layanan publik dan terhambatnya pembangunan ekonomi. Terdapat fakta bahwa di banyak negara berkembang ternyata desentralisasi telah menyebabkan berbagai pengeluaran yang tidak produktif (*unproductive public expenditures*) oleh pemerintah daerah (Chu *et al.*, 1995).

Desentralisasi meliputi penyerahan sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (*money follows function*). Pelaksanaan desentralisasi fiskal mengikuti fungsi-fungsi pemerintahan sehingga kebijakan perimbangan keuangan mengacu kepada tiga prinsip, yaitu:

- a. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- b. pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan
- c. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah melalui kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah pusat, maka alokasi transfer ke daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan alokasi belanja daerah tersebut terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
- b. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
- c. mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*);
- d. meningkatkan pelayanan publik; serta
- e. meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2005, transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp.131,5 triliun dari total belanja negara sebesar Rp.397,7 triliun atau 33,1 persen. Pada tahun 2006, transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp.220,1 triliun dari total belanja negara sebesar Rp.647,7 triliun atau 33,9 persen. Pada tahun 2007, transfer ke daerah dialokasikan sebesar Rp.258,7 triliun dari total belanja negara sebesar Rp.763,6 triliun atau 33,9 persen. Dengan demikian, pada tahun 2006 terjadi peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun 2005 sebesar Rp.88,6 triliun atau 67,4 persen, sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan alokasi transfer ke daerah dari tahun 2006 sebesar Rp.38,6 triliun atau 17,5 persen.

Selain dana desentralisasi, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah

pusat di daerah, yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana instansi vertikal di daerah. Harus diakui bahwa untuk mengejar pembangunan di beberapa daerah yang masih tertinggal dibutuhkan dana yang cukup besar, terutama untuk investasi awal di bidang infrastruktur. Jumlah dana tersebut cukup signifikan dan proporsinya terhadap belanja negara cukup tinggi. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, kebijakan belanja daerah harus lebih diarahkan kepada program-program riil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satu jenis belanja pemerintah adalah belanja modal yang ditujukan untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan infrastruktur, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun penyediaan fasilitas publik. Semakin tinggi tingkat investasi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, dampak dari investasi pemerintah juga dapat memperbaiki iklim investasi swasta sehingga akan meningkatkan penanaman modal swasta yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pada tahun 2005, belanja modal pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp.45,6 triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp.266,2 triliun atau 17,1 persen. Pada tahun 2006, belanja modal pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp.62,9 Triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp.427,6 triliun atau 14,7 persen. Pada tahun 2007, belanja modal pemerintah pusat dialokasikan sebesar Rp.73,1 triliun dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp.504,8 triliun atau 14,4 persen. Dengan demikian, pada tahun 2006 terjadi peningkatan belanja modal pemerintah pusat sebesar Rp.23,8 triliun atau 37,9 persen dari tahun 2005, sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan belanja modal pemerintah pusat sebesar Rp.10,2 triliun atau 16,2 persen dari tahun 2006.

Sementara itu, pada tahun 2005 belanja modal seluruh pemerintah daerah dialokasikan sebesar Rp.32,9 triliun dari total belanja seluruh pemerintah daerah sebesar Rp.159,5 triliun atau 20,6 persen. Pada tahun 2006, belanja modal seluruh

pemerintah daerah dialokasikan sebesar Rp.56,7 triliun dari total belanja seluruh pemerintah daerah Rp.221,3 triliun atau 25,6 persen. Pada tahun 2007, belanja modal seluruh pemerintah daerah dialokasikan sebesar Rp.104,7 triliun dari total belanja seluruh pemerintah daerah Rp.338,9 triliun atau 30,9 persen. Dengan demikian, pada tahun 2006 terjadi peningkatan belanja modal seluruh pemerintah daerah sebesar Rp.23,8 triliun atau 72,3 persen dari tahun 2005, sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan belanja modal seluruh pemerintah daerah sebesar Rp.48 triliun atau 84,7 persen dari tahun 2006.

## 1.2. Perumusan Masalah

Desentralisasi tidak terlepas dari aspek fiskal yang mengakibatkan pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan dan keleluasaan yang lebih besar dalam mengelola anggaran daerah. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana dari pusat ke daerah telah mengakibatkan keleluasaan pemerintah pusat dalam pengalokasian APBN secara agregat semakin berkurang. Sebaliknya, proporsi pengelolaan fiskal daerah melalui APBD semakin meningkat tajam. Dengan kewenangan dan pendanaan yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur yang lebih menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping itu, adanya perbedaan realisasi dana bagi hasil telah mengakibatkan perbedaan keleluasaan dalam pengalokasian belanja modal pemerintah daerah. Daerah-daerah yang memiliki realisasi dana bagi hasil yang lebih besar seharusnya memiliki pengaruh belanja modal pemerintah daerah yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila *output* ekonomi periode tersebut lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu prasyarat dalam rangka perbaikan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan suatu prakondisi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang lain, seperti perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas harga. Salah satu prioritas kebijakan fiskal nasional adalah menggerakkan kembali sektor riil melalui penyediaan infrastruktur yang dapat

menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Kesenambungan proses berantai dari penyediaan infrastruktur yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam skala regional ataupun nasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pendekatan fungsi produksi, misalnya Akai, Nishimura, dan Sakata (2004). Fungsi produksi sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan faktor produksi utamanya, yaitu ketersediaan barang modal dan ketersediaan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, barang modal diasumsikan sebagai bentuk investasi langsung yang dilakukan pemerintah yang terlihat dari realisasi belanja modal pemerintah. Investasi pemerintah akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Dengan pemahaman tersebut, penelitian ini akan mencoba untuk melihat pengaruh realisasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah pusat dan belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. untuk mengetahui sejauh mana pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten/kota yang memiliki dana bagi hasil di atas rata-rata;
- c. untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atau referensi bagi peneliti lain dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, serta dapat memberi manfaat yang luas bagi para pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah.

#### 1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Data pendukung lainnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa konsep atau teori yang mendukung penelitian ini, baik yang bersumber dari *text book*, penelitian ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Model ekonometrik yang terbentuk adalah model regresi linear berganda dengan data *cross section* yang diolah dengan menggunakan alat bantu program *Eviews*. Regresi data dilakukan dengan metode kwadrat terkecil (*ordinary least square*), di mana hasil regresi selanjutnya diuji dengan menggunakan kriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik.

Dalam melihat faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap *output* ekonomi daerah dapat menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. *Output* ekonomi daerah pada tahun yang bersangkutan ( $Y_t$ ) dipengaruhi ketersediaan barang modal pada tahun yang bersangkutan ( $K_t$ ) dan ketersediaan tenaga kerja pada tahun yang bersangkutan ( $L_t$ ). Ketersediaan barang modal pada tahun yang bersangkutan diasumsikan sebagai investasi pemerintah pada tahun yang bersangkutan, yang terdiri dari investasi pemerintah pusat dan investasi pemerintah daerah. Realisasi belanja modal pemerintah pusat pada tahun sebelumnya ( $BMP_{t-1}$ ) merupakan investasi pemerintah pusat pada tahun yang bersangkutan. Realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun sebelumnya ( $BMD_{t-1}$ ) merupakan investasi pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Angkatan kerja pada tahun yang bersangkutan ( $AK_t$ ) merupakan gambaran ketersediaan tenaga kerja pada tahun yang bersangkutan.

Model teoritik dari *output* ekonomi daerah dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = f(K_t, L_t)$$

di mana:

Kt diasumsikan sebagai investasi pemerintah (realisasi belanja modal pemerintah)

Lt diasumsikan sebagai angkatan kerja

maka:

$$Y_t = f(BMP_{t-1}, BMD_{t-1}, AK_t)$$

di mana:

- Y<sub>t</sub> = PDRB kabupaten/kota atas dasar harga berlaku pada tahun t;  
 BMP<sub>t-1</sub> = Realisasi belanja modal pemerintah pusat pada tahun t-1;  
 BMD<sub>t-1</sub> = Realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun t-1;  
 AK<sub>t</sub> = Angkatan kerja di setiap kabupaten/kota pada tahun t.

Model teoritik di atas menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sebagai berikut:

- a. semakin besar realisasi belanja modal pemerintah pusat pada tahun sebelumnya, maka semakin tinggi *output* ekonomi kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan;
- b. semakin besar realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, maka semakin tinggi *output* ekonomi kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan;
- c. semakin besar angkatan kerja di setiap kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan, maka semakin tinggi *output* ekonomi kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat di atas, maka diajukan hipotesa penelitian sebagai berikut:

- a. realisasi belanja modal pemerintah pusat dan realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB;
- b. realisasi belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDRB dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat;

- c. pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB lebih besar pada kabupaten/kota yang memiliki realisasi dana bagi hasil di atas rata-rata;
- d. tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pengamatan dilakukan terhadap 316 kabupaten/kota yang memiliki data lengkap dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Output* ekonomi daerah merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2006.
- c. Realisasi belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2005 merupakan belanja modal Kementerian/Lembaga yang terdapat di kabupaten/kota dengan sumber pendanaan dari APBN tahun 2005, baik yang dilaksanakan secara sendiri oleh kantor pusat atau kantor vertikal di daerah maupun secara bersama dengan pemerintah daerah melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- d. Realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2005 merupakan belanja modal yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota tahun 2005.
- e. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk kategori bekerja dan pengangguran terbuka.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini diuraikan dalam lima bab, yaitu:

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, serta kerangka pikir.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan atas konsepsi desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal di Indonesia, konsepsi pertumbuhan ekonomi, konsepsi belanja pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu.

**BAB 3 : GAMBARAN UMUM**

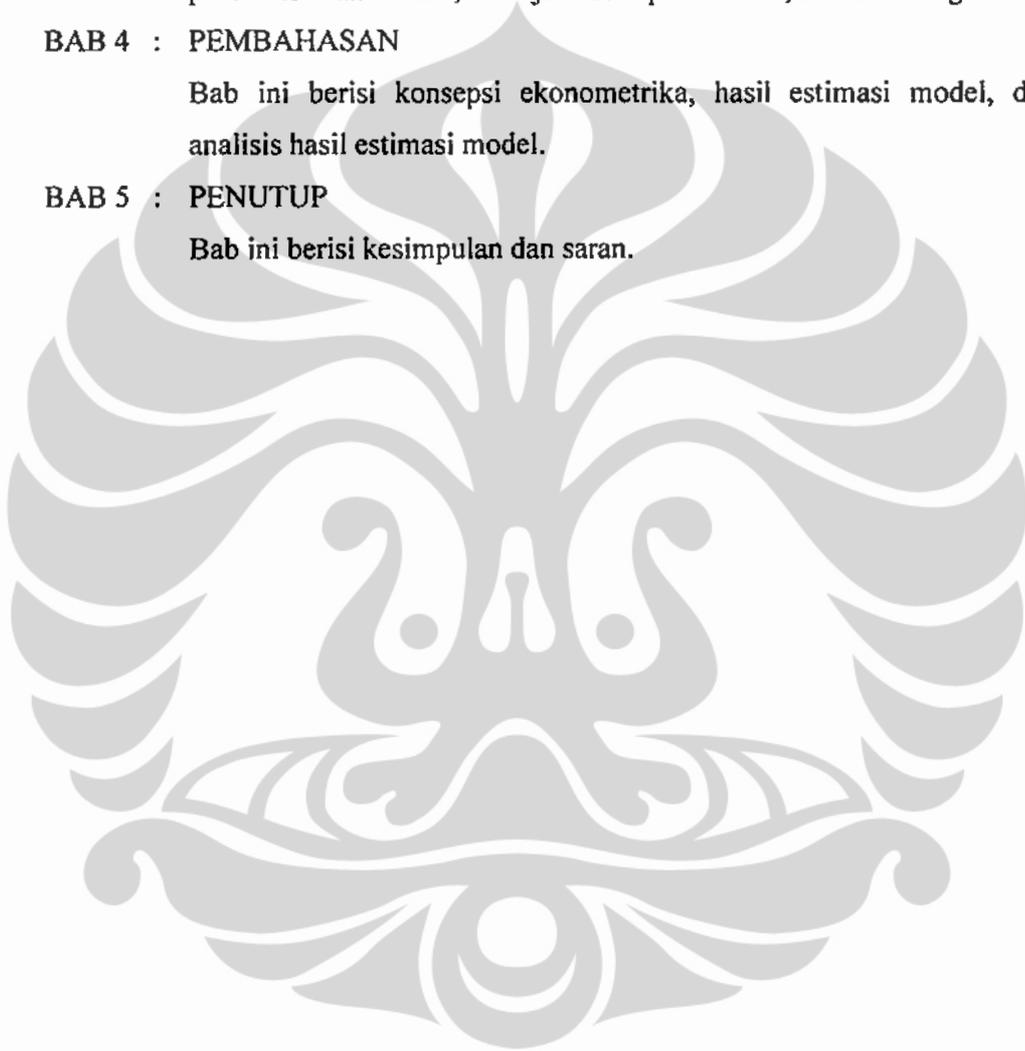
Bab ini berisi gambaran mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia, perekonomian daerah, belanja modal pemerintah, dan dana bagi hasil.

**BAB 4 : PEMBAHASAN**

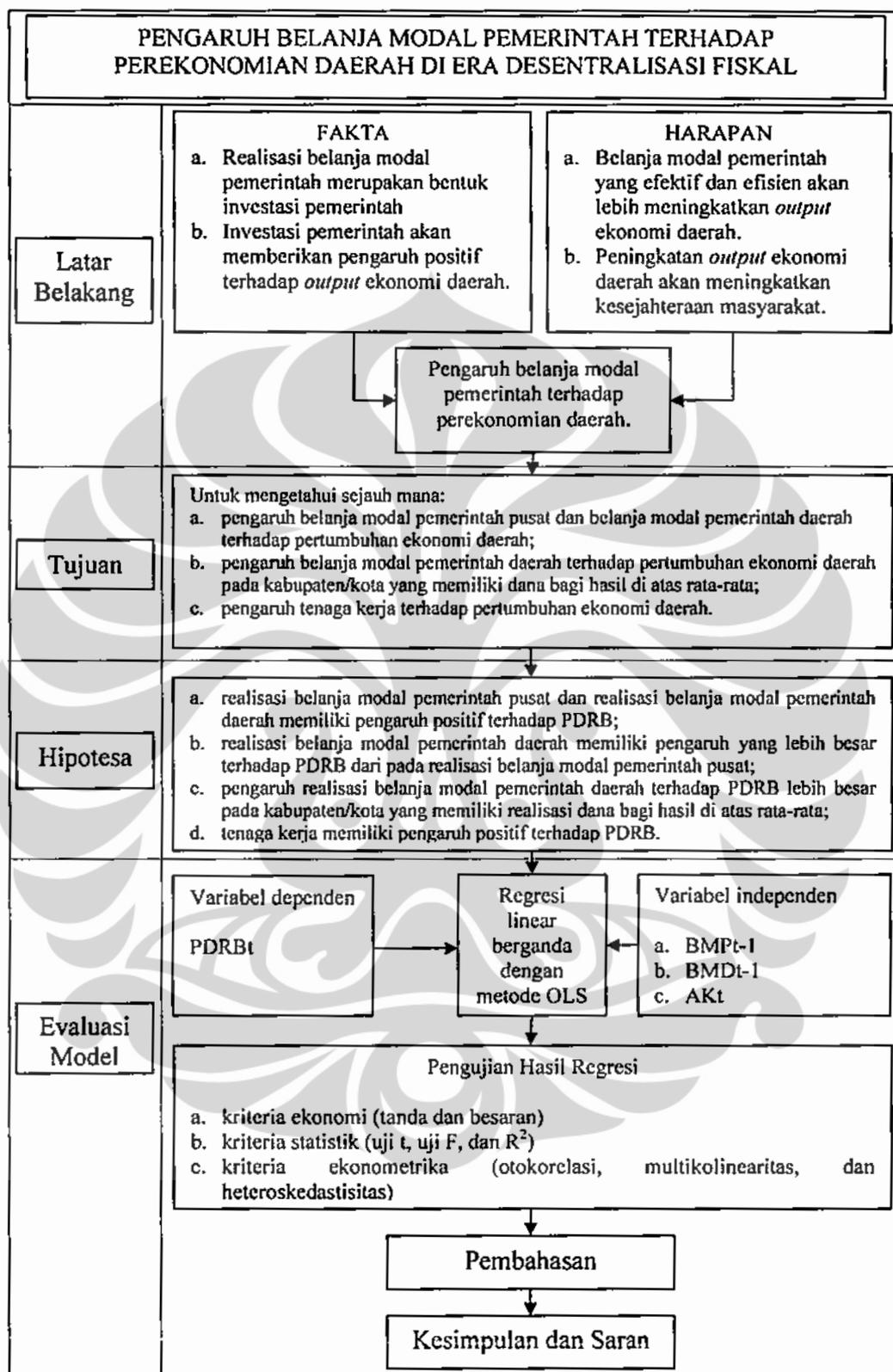
Bab ini berisi konsepsi ekonometrika, hasil estimasi model, dan analisis hasil estimasi model.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## 1.7. Kerangka Pikir



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsepsi Desentralisasi Fiskal

Dalam suatu perekonomian modern, pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Musgrave and Musgrave, 1993). Fungsi alokasi merupakan penyediaan barang dan jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah suatu negara. Fungsi distribusi merupakan penyesuaian atas pendapatan dan kekayaan dalam rangka menciptakan pemerataan dan keadilan. Fungsi stabilisasi merupakan penciptaan kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas terhadap perluasan kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk mengarahkan perekonomian menuju ke kondisi yang lebih baik.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dapat dibagi pada masing-masing tingkat pemerintahan sesuai karakteristik yang dimilikinya. Fungsi distribusi lebih tepat dilaksanakan pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak dapat mengetahui pendapatan masing-masing daerah secara tepat. Fungsi stabilisasi lebih tepat dilaksanakan pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memiliki *spillover effect* bagi daerah lainnya. Sementara itu, fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan pemerintah daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Adanya perbedaan karakteristik tersebut merupakan alasan utama perlunya desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dan tanggung jawab dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menurut studi Bank Dunia yang dilakukan oleh Rondinelli (1981, 1989) sebagaimana dikutip oleh Dillinger (1994), desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*), administratif (*administrative*

*decentralization*), fiskal (*fiscal decentralization*), dan ekonomi (*economic or market decentralization*).

Desentralisasi dalam kaitannya dengan tingkat kemandirian pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk. *Pertama*, dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam hirarki dengan pemerintah pusat di daerah. *Kedua*, devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah memiliki keleluasaan (*discretion*) dalam menyelenggarakan pendelegasian tersebut. Apabila pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. *Ketiga*, pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pihak yang menerima wewenang memiliki keleluasaan (*discretion*) dalam menyelenggarakan pendelegasian tersebut walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (Simanjuntak *et al.*, 2002).

Bahl (2003) telah mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi adalah kesejahteraan akan lebih tinggi karena penyediaan barang dan jasa publik akan lebih cocok dengan *preferensi* penduduk, pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas kualitas barang dan jasa publik, penduduk memiliki keinginan untuk membayar yang lebih tinggi atas barang dan jasa publik karena *preferensi* mereka lebih dihargai pemerintah daerah, dan pemerintah daerah akan mengenal objek pajak lebih baik sehingga pendapatan pajak daerah akan lebih tinggi. Kelemahan desentralisasi adalah kontrol terhadap inflasi menjadi lebih sulit karena sulit untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah daerah, usaha untuk mengoptimalkan sumber dana pembangunan infrastruktur publik akan lebih sulit, dan ketimpangan antar daerah akan menjadi lebih tinggi.

Ada dua prasyarat penting bagi kesuksesan desentralisasi (Bird and Vaillancourt, 2000). *Pertama*, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus

transparan dan pihak-pihak yang terkait harus memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. *Kedua*, biaya-biaya dari pengambilan keputusan tersebut sepenuhnya harus ditanggung masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing daerah maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, serta perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik (Simanjuntak *et al.*, 2002).

Penelitian yang mendukung desentralisasi menyimpulkan bahwa pelayanan publik yang paling efisien akan tercapai apabila diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum (Litvack *et al.*, 1998). Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Keputusan mengenai pengeluaran pemerintah yang dibuat pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan keputusan yang dibuat pemerintah pusat.

Suatu analogi argumen lainnya yang dikenal sebagai *The Tiebot Model* menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kepentingan politisi masyarakat lokal dengan pemerintah daerah. Masyarakat akan memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerah dengan pajak yang dibayar oleh masyarakat. Adanya persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya.

Desentralisasi tidak terlepas dari aspek fiskal, yaitu adanya penyerahan tanggung jawab pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengalaman internasional dengan jelas memperlihatkan bahwa jika suatu negara mendesentralisasikan tanggung jawab pengeluaran yang lebih besar dibanding dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan

akan menurun atau daerah akan menekan pusat untuk mendapatkan kucuran dana yang lebih besar. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran yang didesentralisasikan, maka mobilisasi dana daerah dapat menurun dan ketidakseimbangan ekonomi makro akan muncul. Bahkan, walaupun kedua sisi didesentralisasikan dengan pola yang seimbang, sering dikhawatirkan daerah tidak memiliki kapasitas administratif dan teknis yang cukup memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi barunya secara memadai (Bird and Vaillancourt, 2000).

Penyerahan sumber-sumber penerimaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diwujudkan melalui pemberian kewenangan dalam memungut pajak (*revenue assignment*) dan/atau pemberian bantuan (*grants*). Berdasarkan pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pendapatan daerah ternyata sangat tidak memadai untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah. Artinya, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*intergovernmental transfer*) menjadi suatu keharusan. Implikasi dari kondisi tersebut, transfer dana dari pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan yang amat dominan bagi pemerintah daerah (Simanjuntak *et al.*, 2002).

Berdasarkan sifatnya, transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori (BPPK-Departemen Keuangan, 2004), yaitu transfer tanpa syarat (*unconditional grant, general purpose grant, block grant*) dan transfer dengan syarat (*conditional grant, categorial grant, specific purpose grant*).

#### a. Transfer Tanpa Syarat

Pada umumnya transfer jenis ini ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horizontal. Ciri utama dari transfer ini adalah pemerintah daerah memiliki diskresi penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan atau prioritas daerah. Transfer tanpa syarat biasanya dibagikan berdasarkan suatu formula tertentu.

## b. Transfer Dengan Syarat

Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh pemerintah daerah. Transfer ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu transfer pengimbang (*matching grants*) dan transfer bukan pengimbang (*nonmatching grants*). Transfer pengimbang adalah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan atas jenis urusan tertentu. Transfer bukan pengimbang adalah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menambah dana penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah sendiri akan mengalokasikan dananya dalam jumlah besar atau kecil. Transfer pengimbang (*matching grants*) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transfer pengimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*) dan transfer pengimbang terbatas. Transfer pengimbang tidak terbatas adalah transfer yang ditujukan untuk menutup seluruh kekurangan dana. Transfer pengimbang terbatas adalah transfer yang terdapat batasan jumlah dana maksimum yang dapat digunakan. Transfer ini sangat disukai oleh pemerintah pusat karena walaupun dana yang diberikan sesuai dengan besar proyek namun pemberi bantuan dapat mencukupkan bantuannya setelah besarnya biaya melampaui jumlah tertentu.

Beberapa tujuan dari transfer tersebut adalah koreksi atas ketimpangan vertikal, koreksi atas ketimpangan horizontal, koreksi atas penyebaran eksternalitas, mengarahkan prioritas, eksperimen ide-ide baru, stabilisasi, dan memenuhi standar pelayanan minimum (BPPK-Departemen Keuangan, 2004), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Koreksi atas Ketimpangan Vertikal

Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sumber-sumber penerimaan utama negara yang bersifat nasional, sedangkan pemerintah daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan yang bersifat lokal yang besarnya

relatif kurang signifikan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan vertikal sehingga diperlukan transfer dana dari pemerintah pusat.

#### b. Koreksi atas Ketimpangan Horizontal

Keseimbangan antara kebutuhan pengeluaran (*expenditure needs*) dengan kemampuan untuk menghasilkan penerimaan (*revenue capacity*) juga memiliki dimensi horizontal. Artinya, dengan tarif pajak yang sama seharusnya juga menghasilkan penerimaan yang sama di antara daerah. Pengalaman empirik di berbagai negara menunjukkan ternyata kemampuan daerah untuk menghasilkan penerimaan sangat bervariasi. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan horizontal sehingga diperlukan transfer dana dari pemerintah pusat.

#### c. Koreksi atas Penyebaran Eksternalitas

Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki efek menyebar (eksternalitas) kepada daerah lainnya, misalnya pendidikan tinggi (universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah. Pelayanan publik tersebut tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat di mana pelayanan publik itu tersedia. Tanpa adanya imbalan (penerimaan) yang berarti atas pelayanan publik tersebut, biasanya pemerintah daerah enggan untuk berinvestasi di sini. Pemerintah pusat perlu memberikan insentif agar pelayanan publik tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

#### d. Mengarahkan Prioritas

Setiap level pemerintahan memiliki prioritas masing-masing di dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakatnya, namun seringkali prioritas suatu level pemerintahan bertentangan dengan prioritas level pemerintahan lainnya. Misalnya, pemerintah pusat ingin mengedepankan pembangunan di sektor pendidikan secara murah dan terjangkau sesuai harapan para konstituen

saat pemilihan umum tingkat nasional. Namun demikian, pemerintah daerah ternyata menginginkan pembangunan di sektor kesehatan lebih mendapat prioritas karena pertimbangan kondisi masyarakat setempat. Pemerintah pusat memberikan transfer kepada pemerintah daerah sehingga keinginan pusat dapat berjalan secara paralel dengan kepentingan daerah.

#### e. Eksperimen Ide-Ide Baru

Bantuan (*grant*) seperti ini berawal dari adanya keinginan pemerintah pusat untuk mengujicobakan suatu program baru di suatu daerah sebelum program tersebut diberlakukan terhadap seluruh daerah. Alasan perlunya bantuan dari pusat ke daerah sehubungan dengan uji coba program baru tersebut, karena daerah yang menjadi tempat uji coba tidak mau menanggung kerugian dan risiko manakala terjadi dampak negatif terhadap program baru tersebut. Sesungguhnya bantuan ini tidak lebih dari sebuah kompensasi atas kesediaan daerah menjadi ajang uji coba suatu program baru dari pusat.

#### f. Stabilisasi

Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu. Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian sedang *booming*. Transfer untuk dana-dana pembangunan (*capital grants*) adalah merupakan instrumen yang cocok untuk tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat diperlukan agar tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu tidak berakibat merusak atau bertentangan dengan tujuan stabilisasi.

#### g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum

Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum. Dengan adanya transfer,

penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

## 2.2. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Secara historis, perkembangan era sentralisasi menuju desentralisasi di Indonesia telah melewati beberapa fase yang penuh dengan berbagai kompleksitas permasalahan. Sentralisasi kekuasaan yang cukup dominan dalam sistem pemerintahan di Indonesia lebih didasarkan pada argumen untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta menjadi alasan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 telah meletakkan perubahan yang fundamental dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi, dari yang semula kewenangan didominasi oleh pemerintah pusat kemudian bergeser dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Sebelum desentralisasi fiskal, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan empat jenis transfer, yaitu Subsidi Daerah Otonom (SDO), Bantuan Inpres, Pinjaman Daerah, dan Daftar Isian Proyek (DIP). SDO bertujuan untuk mendukung anggaran rutin daerah, hampir 95 persen dari total SDO digunakan untuk membiayai gaji pegawai pemerintah (PNS) di daerah. SDO dikategorikan sebagai transfer pusat yang bersifat khusus (*specific grant*) karena daerah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan penggunaan SDO, dan kegunaan dari transfer ini sudah ditetapkan pemerintah, yaitu membiayai belanja pegawai di daerah. Sifat SDO sebagai alokasi yang bersifat khusus makin nyata lagi mengingat struktur gaji dan alokasi jumlah pegawai yang ditempatkan di daerah ditentukan sepenuhnya oleh pusat. Pada tahun anggaran 1999/2000 istilah SDO direklasifikasi menjadi Dana Rutin Daerah (DRD) untuk lebih memperjelas penggunaan dari anggaran tersebut.

Bantuan Inpres bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan daerah dan diberikan atas Instruksi Presiden. Program Bantuan Inpres diberikan setiap tahun kepada daerah tingkat I, daerah tingkat II, dan desa yang jumlahnya didasarkan atas kriteria tertentu. Namun mengingat kriteria yang dijadikan dasar

pengalokasian Bantuan Inpres belum transparan, maka Bantuan Inpres tersebut menjadi ajang negosiasi antara pusat dan daerah. Pada tahun anggaran 1999/2000 istilah Bantuan Inpres direklasifikasi menjadi Dana Pembangunan Daerah (DPD).

Selain kedua jenis transfer di atas, daerah diperbolehkan melakukan pinjaman terutama untuk membiayai proyek-proyek yang *cost recovery*. Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan yang terakhir adalah Daftar Isian Proyek (DIP). DIP merupakan proyek sektoral pemerintah pusat (departemen atau nondepartemen) yang dilaksanakan di daerah. SDO dan Bantuan Inpres dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat pemerintahan, sedangkan DIP diklasifikasikan sebagai *inkind allocation* karena walaupun dananya mengalir ke daerah tetapi tidak termasuk ke dalam anggaran daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui dua cara, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah dan pemberian transfer dana. Pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Simanjuntak *et al.* (2002) mengemukakan bahwa kemampuan daerah untuk menghasilkan penerimaan sangat bervariasi, tergantung kondisi daerah bersangkutan memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Kondisi ini berimplikasi kepada besarnya basis pajak atau kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) di daerah-daerah bersangkutan. Adanya kesenjangan fiskal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan peraturan perundangan, pemerintah pusat memberikan transfer dana dari APBN kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga jenis transfer dana tersebut merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam melaksanakan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

DAU dan DBH termasuk dalam kategori transfer tanpa syarat. DAU bertujuan untuk mengatasi ketimpangan horizontal, sedangkan DBH bertujuan

untuk mengatasi ketimpangan vertikal. DAU dialokasikan berdasarkan formula tertentu dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal di masing-masing daerah. Sedangkan DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dengan mengutamakan daerah yang menghasilkan sumber penerimaan tertentu yang dikelola pemerintah pusat, yaitu beberapa jenis pajak dan sumber daya alam.

DAK merupakan jenis transfer yang masuk dalam kategori transfer pengimbang tidak terbatas. DAK bertujuan untuk membantu pendanaan urusan daerah yang menjadi komitmen atau prioritas nasional. Peangalokasian DAK didasarkan pada tiga kriteria yang saling terkait, yaitu kriteria umum (kemampuan keuangan daerah), kriteria khusus (kekhususan perlakuan terhadap suatu daerah), dan kriteria teknis (ketersediaan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional). Daerah yang mendapatkan DAK diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan kebijakan perimbangan keuangan dalam tatanan keuangan negara yang semula termasuk dalam kategori Belanja ke Daerah juga disempurnakan secara bertahap. Penyempurnaan tersebut meliputi pola pembagian DBH yang lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan formulasi DAU yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah, serta penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan DAK. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perbendaharaan negara, sehingga sejak tahun 2008 sebagai pelaksanaan pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai transfer ke daerah. Dengan demikian, diharapkan arah kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya menjadi lebih terukur sebagai capaian kinerja, baik Pemerintah maupun pemerintahan daerah.

Pemerintah juga memberikan perhatian yang besar terhadap sumber PAD. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat memungut sumber-sumber pendapatannya secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Namun demikian, pelaksanaan pemungutannya tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor. Dengan demikian, kebijakan pungutan daerah tidak distortif terhadap perekonomian daerah.

Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun demikian, apabila APBD mengalami defisit maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat maupun pihak lainnya. Pelaksanaan pinjaman daerah harus mengikuti kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung ke luar negeri, jumlah pinjaman tidak boleh lebih dari 75 persen penerimaan umum APBD, *Debt Service Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima), dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan sehingga dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan. Namun demikian, pemerintah daerah harus melakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang menjadi hak dan kewajiban harus diadministrasikan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik berdasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah telah mendapat perubahan yang cukup mendasar, antara lain, bentuk dan struktur APBD, anggaran berbasis kinerja, klasifikasi anggaran, dan prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

### 2.3. Belanja Pemerintah di Indonesia

Kebijakan fiskal pemerintah secara ringkas tercermin dalam anggarannya, yang di Indonesia disebut APBN maupun APBD. Sebelum tahun 2001, pendekatan APBN/APBD adalah anggaran berimbang dan dinamis, di mana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran negara dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2001 sampai saat ini,

pendekatan APBN/APBD adalah anggaran surplus/defisit dengan melakukan perubahan format dan struktur APBN/APBD dari T-Account menjadi I-Account, yaitu APBN/APBD dikelompokkan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan (BPPK-Departemen Keuangan, 2004).

Selama lebih dari 32 tahun pemerintah melaksanakan sistem anggaran yang dikenal dengan *dual budgeting*, di mana pengeluaran dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengelompokan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan semula dimaksudkan untuk menekankan arti pembangunan, namun ternyata menunjukkan banyak kelemahan, yaitu:

- a. duplikasi antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga alokasi dana yang ada tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. dualisme dalam penyusunan Mata Anggaran Keluaran (MAK), di mana terdapat MAK yang sama pada pengeluaran rutin pengeluaran pembangunan;
- c. pengeluaran rutin tidak dibatasi untuk operasional dan pengeluaran pembangunan tidak dibatasi untuk investasi;
- d. proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas akuntansi walaupun proyek hanya bersifat sementara.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), proses penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu (*unified budget*) dengan berbasis kinerja. Penyusunan anggaran secara terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang bertujuan untuk efisiensi belanja negara serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen anggaran disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, di mana dokumen RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Aspek lainnya yang penting adalah keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah sedemikian rupa, sehingga sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, belanja pemerintah daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja pemerintah daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja pemerintah daerah dapat dirinci menurut jenis belanja, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal.

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas yang meliputi belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja modal merupakan pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal dapat dikelompokkan dalam lima kategori utama, yaitu:

- a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal, termasuk di dalamnya biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang diperlukan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan, termasuk di dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jaringan adalah pengeluaran yang diperlukan untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan, serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi atau air bersih.
- e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal dalam bentuk aset fisik lainnya, seperti buku, binatang, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi belanja modal di atas, seperti belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja modal akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, di mana khusus pengeluaran melalui

bendahara pengeluaran maka pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengeluaran atas belanja modal tersebut diakui sebagai aset tetap dalam neraca pemerintah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian Awal Aset Tetap Barang Berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat perolehan aset tersebut. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Belanja modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki *output* berupa aset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-bahan/asistensi dan komponen biaya tersebut diatas diakui sebagai nilai perolehan aset tetap.

Apabila pembangunan dan perolehan terhadap aset tidak bersifat final dan berkelanjutan di mana harus ada keseimbangan antara arus uang dan arus barang, maka menurut standar perlu ada perkiraan untuk melakukan pencatatan tersebut. Perkiraan yang dimaksud adalah Kontruksi Dalam Pengerjaan yang terjadi karena belanja modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal laporan keuangan. Penyajian perkiraan dimaksud diikuti dengan memberikan penjelasan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian perkiraan

Kontruksi Dalam Pengerjaan ini dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan.

#### 2.4. Konsepsi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan, serta untuk mempersiapkan tahapan pembangunan selanjutnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan. Rakyat dikatakan makin sejahtera apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
- b. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesempatan kerja. Mengingat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja meningkat bila pertumbuhan ekonomi meningkat.
- c. Pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang baik adalah distribusi pendapatan yang makin merata melalui peningkatan produktivitas kerja. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan.
- d. Pertumbuhan dapat menyiapkan tahapan pembangunan selanjutnya. Sebuah perekonomian yang mampu terus tumbuh dalam jangka panjang membutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi, tetapi juga kelembagaan-kelembagaan ekonomi dan sosial yang modern.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar dalam periode tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam suatu negara (Mandala dan Prathama, 2004). Definisi tersebut mencakup tiga hal pokok, yaitu:

- a. Produk dan jasa akhir, artinya barang dan jasa yang digunakan pemakai terakhir.
- b. Harga pasar, artinya harga yang berlaku pada saat pembelian barang dan jasa tersebut.

- c. Faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam suatu negara, artinya faktor-faktor produksi yang dimiliki asing maupun domestik yang terdapat pada suatu negara.

Ada tiga pendekatan dalam menghitung PDB, yaitu:

- a. Pendekatan produksi adalah dengan membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi, di mana total keseluruhan *output* sektor produksi tersebut merupakan total *output* perekonomian.
- b. Pendekatan pendapatan adalah dengan menjumlahkan seluruh balas jasa atas seluruh faktor produksi (tenaga kerja, barang modal, uang, dan kewirausahaan), di mana total keseluruhan balas jasa tersebut merupakan total *output* perekonomian.
- c. Pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan pengeluaran masyarakat dan pemerintah dalam rangka pembelian barang dan jasa ditambah dengan pengeluaran swasta dalam rangka pembentukan modal tetap domestik, serta ditambah dengan pengeluaran dalam rangka perdagangan luar negeri (ekspor neto).

Besarnya nilai PDB dapat menunjukkan beberapa hal penting, antara lain:

- a. efisiensi alokasi sumberdaya ekonomi suatu negara, di mana semakin besar PDB maka semakin efisien alokasi sumberdaya ekonomi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa.
- b. kemakmuran suatu negara, di mana alat ukur yang disepakati untuk melihat tingkat kemakmuran adalah PDB dibagi dengan jumlah penduduk (pendapatan perkapita).
- c. masalah-masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketimpangan struktur produksi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena menjadi tolok ukur kemajuan kegiatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat

dari besarnya nilai PDB setiap tahun. Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya tidak lepas dari pengaruh inflasi pada saat itu atau yang disebut PDB harga berlaku (nominal) sehingga diperlukan nilai PDB harga konstan (riil) dengan menetapkan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB harga konstan (riil) terkait dengan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penghitungan selisih antara nilai PDB tahun tertentu dengan PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya.

Ada tiga faktor atau komponen utama yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Todaro, 2000), yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di masa yang akan datang. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja sehingga output akan jauh lebih tinggi dengan input komplementer yang sama.

Salah satu tokoh neo klasik adalah Robert Solow yang terkenal melalui model pertumbuhan Solow. Model ini menunjukkan sejauh mana PDB suatu negara dipengaruhi oleh ketersediaan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Setiap kenaikan PDB yang tidak bersumber dari penyesuaian jangka pendek atas ketersediaan modal dan tenaga, maka dimasukkan dalam kemajuan teknologi yang lazim disebut sebagai residu Solow (*Solow residual*).

Mankiw (2006) menggambarkan ide dari teori pertumbuhan endogen dengan fungsi produksi berikut ini:

$$Y = AK$$

di mana  $Y$  adalah output,  $K$  adalah persediaan modal, dan  $A$  adalah konstanta yang mengukur jumlah *output* yang diproduksi untuk setiap unit modal.

Dalam persamaan di atas diasumsikan bahwa fungsi produksi tidak mengakui adanya pengembalian modal yang kian menurun (*diminishing returns to capital*). Tidak diakuinya *diminishing returns to capital* adalah perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen dengan *Solow* model. Satu unit modal

tambahan memproduksi unit *output* tambahan sebesar  $A$ , tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada.

Untuk melihat bagaimana fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan akumulasi modal dapat dijelaskan dengan persamaan berikut ini:

$$\Delta K = sY - \delta K$$

Persamaan di atas menyatakan bahwa perubahan persediaan modal ( $\Delta k$ ) sama dengan investasi ( $sY$ ) dikurangi dengan depresiasi ( $\delta K$ ). Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi  $Y = AK$ , kita jelaskan sebagai berikut:

$$\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$$

Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan *output*  $\Delta Y/Y$ . Selama  $sA > \delta$ , pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi.

## 2.5. Hasil Kajian Terdahulu

Banyak studi yang berusaha menemukan peranan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi Akai dan Sakata (2002) memperlihatkan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Studi Saragih (2003) juga memperlihatkan bahwa apabila pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Para peneliti juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan

bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

## BAB 3 GAMBARAN UMUM

### 3.1. Profil Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana dimuat dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN Tahun 2009 menunjukkan perubahan yang semakin berpihak kepada daerah. Pada tahun 2001 alokasi transfer ke daerah baru mencakup dana perimbangan. Sejak tahun 2002, alokasi Transfer ke Daerah juga mencakup Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua sebagai pelaksanaan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Dana Penyeimbang (Dana Penyesuaian), yang dialokasikan kepada daerah-daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2008, pemerintah juga mengalokasikan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, mulai tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 setara 1 persen dari pagu DAU nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dari tahun 2001-2008 secara nominal terus meningkat, yaitu dari Rp.81,1 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp.253,3 triliun (6,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp.293,6 triliun (6,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 20,2 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, dana perimbangan yang merupakan komponen terbesar dari Transfer ke Daerah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp.81,1 triliun (4,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp.244,0 triliun (6,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan mencapai Rp.279,6 triliun (6,0 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 19,3 persen per tahun.

Sejalan dengan peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan, realisasi DBH (termasuk pengalihan DAK Dana Reboisasi ke dalam DBH SDA Kehutanan) menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu

dari Rp.20,7 triliun (1,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp.62,9 triliun (1,6 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp.78,9 triliun (1,7 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh 21,0 persen per tahun. Peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun juga terjadi pada DAU, terkait dengan meningkatnya rasio alokasi DAU terhadap Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto, dari 25 persen dalam periode 2001–2003, menjadi 25,5 persen dalam periode tahun 2004–2005, dan kemudian menjadi 26,0 persen dalam periode tahun 2006–2008. Sejalan dengan peningkatan rasio DAU terhadap PDN neto tersebut, maka dalam rentang waktu 2001–2008, realisasi DAU meningkat dari Rp.60,3 triliun (3,6 persen terhadap PDB) dalam tahun 2001 menjadi Rp.164,8 triliun (4,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp.179,5 triliun (3,8 persen terhadap PDB) pada tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 16,9 persen per tahun. Sementara itu, realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang (Dana Penyesuaian) dalam periode 2002–2008 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari Rp.3,5 triliun (0,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2002 menjadi Rp.9,3 triliun (0,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp.14,0 triliun (0,3 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, atau rata-rata tumbuh sebesar 25,7 persen per tahun.

Sumber pendanaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri adalah PAD. PAD provinsi menunjukkan kecenderungan naik, dari Rp.27,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp.33,2 triliun pada tahun 2007. Sementara itu, meskipun PAD kabupaten/kota meningkat dari Rp.10,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp.14,1 triliun pada tahun 2007, namun proporsi PAD kabupaten/kota terhadap total pendapatan kabupaten/kota relatif lebih kecil dibandingkan proporsi PAD provinsi terhadap total pendapatan provinsi. Pada tahun 2007 proporsi PAD provinsi terhadap total pendapatan provinsi adalah 45,1 persen sedangkan proporsi PAD kabupaten/kota terhadap total pendapatan kabupaten/kota adalah 6,1 persen. Pada tahun 2005 proporsi total PAD terhadap total pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota mencapai 17,4 persen. Selanjutnya pada tahun 2006–2008 proporsi tersebut turun dan relatif konstan pada kisaran 15,6 persen.

### 3.2. Profil Perekonomian Daerah

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan Bank Indonesia, perekonomian nasional tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen atau sedikit melambat dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 5,6 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih banyak dipengaruhi kegiatan ekonomi di wilayah Jakarta-Banten serta wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra). Wilayah Jakarta-Banten dan wilayah Jabalnusra memberikan kontribusi terbesar terhadap kinerja ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah yang memiliki pangsa sekitar 60 persen dari PDB nasional ini tetap tinggi sehingga dapat menahan pelambatan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta-Banten dan wilayah Jabalnusra tercatat masing-masing 6,4 persen dan 5,5 persen. Sementara itu, pertumbuhan di wilayah Sumatera dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kali-Sulampua) lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta-Banten dan Jabalnusra secara sektoral terutama didorong kelompok sektor sekunder terutama sektor industri pengolahan dan kelompok sektor jasa seperti sektor perdagangan, bangunan, dan pengangkutan-komunikasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Kali-Sulampua banyak didorong kelompok sektor primer seperti sektor pertanian dan pertambangan dan kelompok sektor jasa seperti sektor perdagangan, pengangkutan-komunikasi dan kelompok sektor industri. Meskipun beberapa sektor ekonomi khususnya sektor primer meningkat cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Kali-Sulampua secara keseluruhan tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan kinerja tersebut tidak terlepas dari peran perkembangan komponen pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti ketersediaan infrastruktur dan keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek ekonomi di daerah.

Permasalahan keterbatasan sarana penunjang pengangkutan masih dihadapi wilayah Sumatera dan Kali-Sulampua. Di wilayah Sumatera, kerusakan jalur pengangkutan darat di beberapa propinsi relatif besar. Di wilayah Kali-Sulampua, permasalahan menyangkut kerusakan jalan darat (termasuk akibat

bencana alam) dan beberapa jembatan Trans Sulawesi, seperti yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara-Gorontalo. Kapasitas pengangkutan udara terkendala akibat keterbatasan fasilitas bandara terutama kemampuan landasan pacu, sebagaimana terjadi di Sulawesi Tengah, Papua, dan Sulawesi Barat. Kapasitas pengangkutan laut juga rendah akibat keterbatasan sarana pelabuhan (dermaga dan *cold storage*), faktor pendangkalan, dan frekuensi kedatangan kapal. Di samping itu, ketersediaan energi yang belum memadai juga menyebabkan rendahnya minat untuk melakukan pengembangan usaha ke daerah.

Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi apabila ditinjau dari distribusi usaha (perusahaan) disebabkan oleh sebaran usaha/perusahaan yang cenderung dominan berlokasi di Jakarta-Banten dan Jabalnusra. Distribusi usaha (perusahaan) di Indonesia ditinjau dari wilayah lebih tersebar di wilayah Jakarta-Banten dan Jabalnusra. Dari 22,7 juta usaha/perusahaan, sebanyak 15,7 juta usaha/perusahaan atau sebesar 69,2 persen berada di wilayah Jakarta-Banten dan Jabalnusra, sedangkan jumlah usaha/perusahaan di Sumatera sebanyak 4,0 juta usaha atau sebesar 17,69 persen, dan Kali-Sulampua sebanyak 3,0 juta usaha/perusahaan atau sebesar 13,2 persen.

Berdasarkan Tabel 3.1. di bawah ini, terlihat bahwa pada tahun 2006 terdapat tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,97 persen, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,68 persen, dan Provinsi Gorontalo sebesar 7,30 persen. Sementara itu, tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Papua sebesar minus 17,2 persen, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,19 persen, dan Provinsi NAD sebesar 2,40 persen. Sepanjang tahun 2001-2008, daerah yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Papua sebesar 36,40 persen pada tahun 2005. Sedangkan daerah yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Papua juga. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi NAD dan Provinsi Papua lebih banyak disebabkan oleh fluktuasi ekspor hasil-hasil pertambangan.

Tabel 3.1. Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi Tahun 2001 – 2006

No.	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	NAD	-10,73	20,07	5,52	-9,63	-10,12	2,40
2.	Sumatera Utara	3,98	4,56	4,81	5,74	5,48	6,18
3.	Sumatera Barat	3,66	4,69	5,26	5,47	5,73	6,14
4.	Riau	-0,14	2,66	2,45	2,93	5,41	5,15
5.	Jambi	6,65	5,86	5,00	5,38	5,57	5,89
6.	Sumatera Selatan	2,47	3,08	3,68	4,63	4,84	5,20
7.	Bangka Belitung	5,71	6,75	11,93	3,28	3,47	3,48
8.	Bengkulu	4,15	4,73	5,37	5,38	5,82	5,95
9.	Lampung	3,59	5,62	5,76	5,07	4,02	4,93
10.	DKI Jakarta	4,74	4,89	5,31	5,65	6,01	5,90
11.	Jawa Barat	3,16	3,76	4,67	4,77	5,62	6,01
12.	Banten	3,95	4,11	5,07	5,63	5,88	5,53
13.	Jawa Tengah	3,59	3,55	4,98	5,13	5,35	5,33
14.	DIY Yogyakarta	4,26	4,50	4,58	5,12	4,73	3,69
15.	Jawa Timur	3,76	3,80	4,78	5,83	5,84	5,80
16.	Kalimantan Barat	2,69	4,55	3,12	4,79	4,69	5,23
17.	Kalimantan Tengah	2,95	5,30	4,91	5,56	5,90	5,84
18.	Kalimantan Selatan	4,15	3,80	4,37	5,03	5,06	4,76
19.	Kalimantan Timur	4,73	1,74	1,86	1,75	3,17	2,82
20.	Sulawesi Utara	2,13	3,32	3,20	4,26	4,90	6,16
21.	Gorontalo	5,55	6,45	6,88	6,93	7,19	7,30
22.	Sulawesi Tengah	5,10	5,62	6,21	7,15	7,57	7,97
23.	Sulawesi Selatan	5,23	4,08	5,42	5,26	6,05	6,72
24.	Sulawesi Tenggara	5,01	6,66	7,57	7,51	7,31	7,68
25.	Bali	3,54	3,04	3,57	4,62	5,56	5,28
26.	NTB	7,32	3,51	3,90	6,07	1,79	2,19
27.	NTT	4,73	4,88	4,57	4,77	3,42	5,08
28.	Maluku	-0,03	2,87	4,31	4,43	5,07	5,55
29.	Maluku Utara	1,67	2,44	3,82	4,71	5,10	5,48
30.	Papua	8,89	5,15	-0,28	-22,53	36,40	-17,20
31.	Kepulauan Riau	-1,34	2,57	4,82	6,47	6,57	6,78
32.	Sulawesi Barat	3,80	4,20	3,21	5,86	5,92	6,99
33.	Papua Barat	3,34	5,07	7,68	7,39	6,80	4,55

Sumber : Departemen Keuangan, data diolah.

Berikut ini dapat dilihat lima kabupaten/kota yang memiliki PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi dan terendah pada tahun 2006.

Tabel 3.2. PDRB Kabupaten/Kota Harga Berlaku  
Tertinggi Tahun 2006

No.	Daerah	PDRB (Rp. juta)
1.	Kota Surabaya	112.926.943,70
2.	Kabupaten Bekasi	66.239.906,50
3.	Kabupaten Cilacap	61.836.966,69
4.	Kota Bontang	49.988.669,06
5.	Kota Medan	48.922.904,15

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah.

Catatan: Pengamatan terhadap 316 kabupaten/kota.

Tabel 3.3. PDRB Kabupaten/Kota Harga Berlaku  
Terendah Tahun 2006

No.	Daerah	PDRB (Rp. juta)
1.	Kabupaten Nunukan	92.377,04
2.	Kabupaten Malinau	137.802,27
3.	Kabupaten Lembata	202.339,87
4.	Kabupaten Halmahera Tengah	222.480,05
5.	Kabupaten Halmahera Timur	236.180,79

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah.

Catatan: Pengamatan terhadap 316 kabupaten/kota.

### 3.3. Profil Belanja Pemerintah Pusat

Pada dasarnya, anggaran belanja pemerintah pusat yang cukup tinggi pada tahun 2006 telah sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Belanja pemerintah pusat memiliki dua fungsi, yaitu menjalankan roda pemerintahan dan menggerakkan kegiatan ekonomi secara umum. Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung proses konsolidasi fiskal dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya pemberian stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara dengan tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan.

Adanya peningkatan kapasitas fiskal pemerintah pusat mengakibatkan volume anggaran belanja negara tahun 2006 bertambah besar jika dibandingkan dengan tahun 2005. Adapun dampak realisasi belanja pemerintah pusat terhadap sektor riil tercermin dari meningkatnya persentase belanja modal pemerintah terhadap PDB di tahun 2006 sebesar 1,6 persen, meningkat dibanding tahun 2005 yang hanya mencapai 1,1 persen. Rasio belanja modal pemerintah pusat terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar 1,3 persen, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 1,65 persen. Peningkatan rasio belanja modal pemerintah pusat terhadap PDB menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk menggerakkan kembali sektor riil.

Berdasarkan Tabel 3.4. di bawah ini, realisasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 adalah sebesar Rp.361,2 triliun, yang berarti lebih rendah Rp.50,4 triliun atau 12,24 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp.411,6 triliun. Realisasi tertinggi adalah subsidi sebesar Rp.120,8 triliun atau 33,44 persen dari total realisasi. Realisasi terendah adalah belanja barang sebesar Rp.29,2 triliun atau 8,08 persen dari total realisasi. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2006 adalah sebesar Rp.440,7 triliun, yang berarti Rp.37,5 triliun atau 7,84 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp.478,2 triliun. Realisasi tertinggi adalah subsidi sebesar Rp.107,4 triliun atau 24,37 persen dari total realisasi. Realisasi terendah adalah belanja barang sebesar Rp.47,2 triliun atau 10,71 persen dari total realisasi.

Tabel 3.4. Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja  
Tahun 2005-2006

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp. triliun)		Anggaran (Rp. triliun)		Persentase Realisasi Terhadap Total		Persentase Realisasi Terhadap Anggaran	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1.	Belanja Pegawai	54,3	73,2	61,7	78,9	15,0	16,6	88,0	92,8
2.	Belanja Barang	29,2	47,2	40,5	55,5	8,1	10,7	72,1	85,0
3.	Belanja Modal	32,9	54,9	56,5	66,7	9,1	12,5	58,2	82,3
4.	Pembayaran Bunga Utang	65,2	79,9	60,9	82,5	18,0	18,1	107,1	96,8
5.	Subsidi	120,8	107,4	119,1	107,6	33,5	24,4	101,4	99,8
6.	Bantuan Sosial	24,9	40,7	30,4	44,6	6,9	9,2	81,9	91,3
7.	Belanja Lain-lain	33,9	37,4	42,5	42,4	9,4	8,5	79,8	88,2
Total		361,2	440,7	411,6	478,2	100	100	87,8	92,2

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 dan 2006 (*audited*).

Selanjutnya, realisasi belanja modal pemerintah pusat dalam tahun 2005 sebesar Rp.32,9 triliun atau 9,11 persen dari total realisasi. Daya serap belanja modal pemerintah pusat sebesar 58,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp.56,5 triliun. Sementara itu, realisasi belanja modal pemerintah pusat tahun 2006 sebesar Rp.54,9 triliun atau 17,69 persen dari total realisasi belanja. Daya serap belanja modal pemerintah pusat sebesar 82,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp.66,7 triliun. Realisasi belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp.22 triliun atau 66,87 persen dari tahun 2005. Total anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun 2006 meningkat Rp.66,6 T atau 16,18 persen dari tahun 2005. Total realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2006 meningkat Rp.79,5 T atau 22 persen dari tahun 2005.

### 3.4. Profil Belanja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Tabel 3.5. di bawah ini, pada tahun 2005 total realisasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp.205,03 triliun. Belanja pegawai yang tertinggi sebesar Rp.85,63 triliun atau 41,8 persen, sedangkan yang terendah adalah belanja lainnya sebesar Rp.28,69 T atau 14,0 persen. Realisasi belanja modal sebesar Rp.45,48 triliun atau 22,2 persen. Sementara itu, pada tahun 2006 total realisasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp.253,56 triliun. Belanja pegawai yang tertinggi sebesar Rp.81,86 triliun atau 32,3 persen, sedangkan yang terendah adalah belanja lainnya sebesar Rp.37,86 T atau 14,9 persen. Realisasi belanja modal sebesar Rp.54,80 triliun atau 21,6 persen.

Total realisasi belanja pemerintah daerah pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp.48,53 triliun atau 23,7 persen dari tahun 2005. Penurunan terdapat pada belanja pegawai sebesar Rp.3,77 triliun atau 4,4 persen. Peningkatan yang tertinggi terdapat pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.33,83 triliun atau 74,8 persen. Belanja modal pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.9,32 triliun atau 20,5 persen.

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah  
Menurut Jenis Belanja Tahun 2005 dan 2006

No.	Jenis Belanja	2005	2006	Peningkatan/ Penurunan
1.	Belanja Pegawai	Rp.85,63 T (41,8%)	Rp.81,86 T (32,3 %)	-Rp.3,77 T (-4,4 %)
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.45,22 T (22,0%)	Rp.79,05 T (31,2 %)	Rp.33,83 T (74,8 %)
3.	Belanja Modal	Rp.45,48 T (22,2%)	Rp.54,80 T (21,6 %)	Rp.9,32 T (20,5 %)
4.	Belanja Lainnya	Rp.28,69 T (14,0%)	Rp.37,86 T (14,9 %)	Rp.9,17 T (31,9 %)
Total		Rp.205,03 T (100%)	Rp.253,56 T (100 %)	Rp.48,53 T (23,7 %)

Sumber : Nota Keuangandan RAPBN Tahun 2009.

Catatan: Belanja Lainnya termasuk Belanja Pemeliharaan, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Tersangka.

Berdasarkan Tabel 3.6. dan Tabel 3.7. di bawah ini, dapat dilihat realisasi belanja modal pemerintah daerah yang tertinggi dan terendah pada tahun 2005 dari 316 kabupaten/kota yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini.

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah  
Tertinggi Tahun 2005

No.	Daerah	Belanja Modal (Rp. juta)
1.	Kabupaten Bengkalis	677.426,52
2.	Kabupaten Siak	499.809,64
3.	Kabupaten Tangerang	296.803,68
4.	Kabupaten Bogor	248.885,10
5.	Kabupaten Bekasi	242.976,68

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah  
Terendah Tahun 2005

No.	Daerah	Belanja Modal (Rp. juta)
1.	Kabupaten Kepahiang	9.348,73
2.	Kota Surakarta	10.175,44
3.	Kabupaten Kulon Progo	12.963,81
4.	Kabupaten Minahasa Selatan	13.059,01
5.	Kabupaten Tabanan	13.679,37

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah.

### 3.5. Profil Dana Bagi Hasil

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, DBH dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan sumber daya alam. Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak yang dibagihasilkan ke daerah meliputi Pajak Penghasilan, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari SDA yang dibagihasilkan ke daerah meliputi SDA minyak bumi, SDA gas bumi, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Sejak tahun 2006, DBH SDA kehutanan juga mencakup DBH dana reboisasi, yang merupakan pengalihan dari Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK DR).

Berdasarkan Tabel 3.8. di bawah ini, dapat dilihat sebaran realisasi DBH dan belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2005 dari 316 kabupaten/kota yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini. Rata-rata DBH daerah pengamatan sebesar Rp.73,36 miliar.

Tabel 3.8. Sebaran Realisasi Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Tahun 2005

Keterangan	Di atas rata-rata	Di bawah rata-rata	Total
Dana Bagi Hasil	Rp.15,64 T	Rp.7,54 T	Rp.23,18 T
Belanja Modal	Rp.7,56 T	Rp.11,66 T	Rp.19,22 T
Jumlah Daerah	54	262	318
% DBH	67,47	32,52	100
% BMD	39,33	60,67	100
% BMD terhadap DBH	48,34	154,64	82,92
% Daerah	17,08	82,92	100

Sumber : Departemen Keuangan, data diolah.

Berdasarkan Tabel 3.9. dan Tabel 3.10. di bawah ini, dapat dilihat realisasi dana bagi hasil yang tertinggi dan terendah pada tahun 2005 dari 316 kabupaten/kota yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini.

Tabel 3.9. Realisasi Dana Bagi Hasil  
Tertinggi Tahun 2005

No.	Daerah	DBH (Rp. juta)
1.	Kab. Bengkalis	1.489.874,62
2.	Kab. Siak	1.025.414,02
3.	Kab. Rokan Hilir	1.020.221,89
4.	Kab. Kampar	687.246,81
5.	Kab. Musi Banyuasin	675.975,19

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah.

Tabel 3.10. Realisasi Dana Bagi Hasil  
Terendah Tahun 2005

No.	Daerah	DBH (Rp. juta)
1.	Kabupaten Kepahiang	7.936,26
2.	Kabupaten Rote Ndao	8.247,81
3.	Kabupaten Mukomuko	8.377,47
4.	Kabupaten Manggarai Barat	9.657,55
5.	Kabupaten Pariaman	10.387,82

Sumber: Departemen Keuangan, data diolah.

## BAB 4 PEMBAHASAN

### 4.1. Konsepsi Ekonometrika

Ekonometrika berarti pengukuran ekonomi di mana regresi merupakan metode estimasi utama. Regresi dilakukan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel bebas didasarkan pada nilai variabel terikat. Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukkan hubungan yang bersifat acak (*random*) atau stokastik. Hasil regresi menunjukkan tingkat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sebelum melakukan uji terhadap hasil regresi, maka perlu memperhatikan normalitas distribusi variabel terikat yang dapat dilihat dari distribusi *residual* ( $\epsilon$ ). Residual dari suatu regresi disyaratkan berdistribusi normal untuk memenuhi asumsi *zero mean*. Jika residual berdistribusi normal, maka variabel terikat juga berdistribusi normal. Sebaliknya, jika residual berdistribusi tidak normal, maka variabel terikat juga berdistribusi tidak normal.

Akibat ketidaknormalan data adalah penggunaan uji t dan uji F menjadi tidak dapat diterima kebenarannya karena uji t dan uji F diturunkan dari asumsi bahwa data residual atau variabel terikat memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan metode *Jarque Berra* (JB test). Jika nilai JB test lebih besar dari tingkat kesalahan model ( $\alpha$ ) berarti model memiliki distribusi normal.

Apabila data regresi memiliki distribusi yang tidak normal, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. pemotongan data, mungkin ada data yang berada jauh dari rata-rata (*out-liers*) di mana nilainya sangat tinggi atau sangat rendah;
- b. perbesar sampel, jika sampel besar sekali maka data akan mendekati normal, *asymptotically* normal;
- c. transformasi data, misalnya dilogaritmakan.

Data-data seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenjang pendidikan merupakan data-data yang bersifat kualitatif sehingga tidak dapat digunakan untuk regresi maka perlu adanya transformasi data kualitatif menjadi kuantitatif, atau biasa disebut dengan *dummy variable*. Misalnya jenis kelamin laki-laki diberi angka 1 dan perempuan diberi angka 0, sehingga variabel yang tadinya bersifat kualitatif berubah menjadi kuantitatif.

Hasil estimasi model yang dihasilkan suatu regresi harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu:

- a. kriteria ekonomi bertujuan untuk melihat kesesuaian tanda hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat didasarkan pada teori;
- b. kriteria statistik bertujuan untuk melihat signifikansi dan kemampuan variabel bebas, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, dalam menjelaskan variabel terikat dari suatu model;
- c. kriteria ekonometrik bertujuan untuk memperoleh parameter yang *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)* dari suatu model.

Pemenuhan kriteria ekonomi dilakukan dengan memperhatikan tanda parameter dari setiap variabel bebas. Apabila memiliki tanda positif berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel terikat. Artinya peningkatan variabel bebas akan mengakibatkan peningkatan variabel terikat. Apabila memiliki tanda negatif berarti variabel bebas memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel terikat.

Pemenuhan kriteria statistik dilakukan dengan uji t, uji F, nilai determinasi ( $R^2$ ). Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikannya suatu variabel penjelas dalam mempengaruhi variabel tak bebas. Uji t akan terpenuhi apabila *P-value* dari setiap variabel bebas lebih kecil dari tingkat kesalahan model ( $\alpha$ ). Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penjelas secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Uji F akan terpenuhi apabila koefisien dari setiap variabel bebas ( $\beta$ ) tidak sama dengan nol. Variasi variabel terikat dapat dilihat dari koefisien ( $R^2$ ) yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai  $R^2$  semakin mendekati 1, maka garis regresi mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel terikat.

Kriteria ekonometrik dilihat dari pelanggaran terhadap asumsi yang meliputi otokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Otokorelasi

Otokorelasi sering terjadi pada pengamatan yang dilakukan pada data runtun waktu (*time series*). Otokorelasi berarti adanya korelasi data yang diurutkan dengan order waktu (*time series*) atau antar tempat (*cross section*) sehingga parameter menjadi tidak efisien. Jika terdapat otokorelasi maka nilai parameter  $\beta$  yang diperoleh tetap linear dan tidak bias, tetapi varian atau  $S_{\beta}$  yang besar. Varians estimasi parameter yang tidak efisien ini menyebabkan nilai  $t$  hitung cenderung kecil dan hasil pengujian cenderung menerima hipotesis nol ( $H_0$ ). Untuk menguji adanya otokorelasi dapat dilihat dari nilai DW (*Durbin Watson*). Jika nilai DW antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak terdapat otokorelasi pada model.

#### Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah korelasi linear yang sempurna atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Masalah multikolinearitas terjadi jika dua atau lebih variabel (atau kombinasi beberapa variabel) berkorelasi tinggi satu sama lain. Jika dijumpai adanya multikolinearitas, maka kemungkinan dijumpai masalah sebagai berikut:

- a. perubahan kecil data dapat merubah parameter secara lebih besar;
- b. variabel mempunyai koefisien yang besar.

Sepanjang uji  $t$  sudah signifikan maka multikolinearitas tidak menjadi penting karena arah pembiasan  $S_{\beta}$  yang selalu membesar. Logikanya, jika  $t = b$  dibagi bilangan yang bias membesar masih signifikan maka  $t$  sebenarnya lebih signifikan lagi. Akan tetapi, jika uji  $t$  tidak signifikan maka perlu dilakukan pengujian terhadap multikolinearitas. Untuk menguji adanya multikolinearitas

dapat dilakukan dengan menganalisis *Condition Index* (CI) melalui program Eviews. Jika nilai koefisien korelasi di bawah 0,85 berarti tidak terdapat multikolinearitas pada model.

### Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas umum terjadi dalam data yang diambil pada satu waktu saja (*cross section*) dengan jumlah responden yang besar. Salah satu asumsi dari *error-term* dalam OLS adalah varians *error-term* untuk setiap pengamatan sama untuk seluruh nilai variabel bebas atau homoskedastisitas (asumsi varians yang konstan). Jika asumsi ini tidak dipenuhi dalam suatu kasus tertentu, maka dapat dikatakan *error-term* bersifat heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan:

- a. estimasi dengan menggunakan OLS tidak akan memiliki varians yang minimum atau estimator tidak efisien;
- b. prediksi dengan estimator dari data yang sebenarnya akan mempunyai varians yang tinggi sehingga prediksi menjadi tidak efisien;
- c. tidak dapat diterapkannya uji nyata tidaknya koefisien atau selang kepercayaan dengan menggunakan formula yang berkaitan dengan nilai varians:

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan metode White, yaitu membandingkan nilai *chi-square* hitung dari informasi  $Obs \cdot R\text{-squared}$  dengan nilai *chi-square* kritis. Jika nilai *chi-square* hitung lebih kecil dari nilai *chi-square* kritis berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada model.

### 4.2. Hasil Estimasi Model

Regresi data menggunakan metode kwadrat terkecil atau *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan alat bantu program Eviews 4.1. Model *output* ekonomi daerah yang terbentuk merupakan model persamaan non linear tetapi linear dalam parameter sehingga perlu dilakukan transformasi data yang ada ke dalam bentuk logaritma natural. Transformasi data tersebut memiliki keuntungan, yaitu

*pertama*, membuat model persamaan menjadi linear; *kedua*, arti dari parameter berubah menunjukkan elastisitas, di mana besarnya  $\beta$  dimaknai sebagai perubahan dalam satuan persentase.

Berdasarkan fungsi produksi Cobb Douglas, maka model ekonometrik dari *output* ekonomi daerah dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = cK_t^a L_t^b \varepsilon$$

Model ekonometrik dari *output* ekonomi daerah di atas memiliki bentuk non linear dalam variabel namun linear dalam parameter. Pengubahan variabel ke dalam bentuk linear dilakukan dengan menggunakan logaritma natural.

$$\text{LnPDRB} = \text{Ln}C + \beta_1 \text{LnBMP} + \beta_2 \text{LnBMD} + \beta_3 \text{LnBMD} * D1 + \beta_4 \text{LnAK} + \varepsilon$$

di mana:  $\text{Ln}C = C$

$$\text{LnPDRB} = C + \beta_1 \text{LnBMP} + \beta_2 \text{LnBMD} + \beta_3 \text{LnBMD} * D1 + \beta_4 \text{LnAK} + \varepsilon$$

di mana:

- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku;  
 BMP = Realisasi belanja modal pemerintah pusat;  
 BMD = Realisasi belanja modal pemerintah daerah;  
 AK = Angkatan kerja;  
 D1 = *Dummy variable*, di mana  $D = 1$  untuk kabupaten/kota yang memiliki realisasi dana bagi hasil di atas rata-rata, dan  $D = 0$  untuk kabupaten/kota yang memiliki realisasi dana bagi hasil di bawah rata-rata.  
 $\varepsilon$  = Residual.

Hasil estimasi model dengan tingkat kepercayaan 95 persen dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Hasil Regresi Model Tahap Pertama

Variabel	LOG(PDRB)		
	Koefisien	t-statistic	Probability t-test
C	2.186297	2.657906	0.0083
LOG(BMP)	0.081034	3.806279	0.0002
LOG(BMD)	0.199537	2.748062	0.0063
LOG(BMD)*DI	0.069073	6.649514	0.0000
LOG(AK)	0.805895	20.50206	0.0000
R-Squared	0.709550	F-statistic	189.9378
Adj R-Squared	0.705814	Prob(F-statistic)	0.000000
Durbin-Watson stat	1.704858	N	316

Sumber: *Print-out Program Eviews*

Pengujian normalitas terhadap variabel terikat PDRB menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB test), di mana nilai JB test sebesar 3,79 atau lebih besar dari tingkat kesalahan sebesar 0,05. Artinya, data PDRB memiliki distribusi normal.

Selanjutnya, pengujian terhadap hasil estimasi model menggunakan kriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik.

#### a. Kriteria Ekonomi

Tanda koefisien ( $\beta$ ) dari variabel bebas BMP, BMD, dan AK adalah positif. Artinya, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat telah sesuai dengan hipotesa pada saat pembentukan model.

#### b. Kriteria Statistik

Hasil pengujian secara individu (uji t) menunjukkan bahwa variabel bebas BMP, BMD, dan AK adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini dapat dilihat dari *P-value* yang diperoleh setiap variabel bebas lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0,05. Nilai statistik uji F dari model sebesar 189,937 dengan Prob F-statistic (*P-value*) = 0,0000 (sangat kecil) dan semua

koefisien regresi berbeda dengan nol. Nilai  $R^2$  sebesar 0,7095 menyatakan bahwa kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat adalah 70,95 persen. Angka tersebut sudah tinggi untuk regresi data yang bersifat *cross section*.

### c. Kriteria Ekonometrik

Uji otokorelasi menggunakan nilai DW, di mana nilai DW pada model sebesar 1,83 atau berada di antara 1,5 sampai 2,5 maka tidak terdapat otokorelasi pada model.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis *condition index* (CI) melalui program Eviews sebagaimana terlihat pada tabel 4.2. di bawah ini. Data menunjukkan bahwa tidak ada nilai koefisien yang melebihi 0,85 maka tidak terdapat multikolinearitas pada model.

Tabel 4.2. Hasil Analisis Conditon Index (CI)

	LOG(BMP)	LOG(BMD)	LOG(AK)
LOG(BMP)	1.000000	0.121845	0.264307
LOG(BMD)	0.121845	1.000000	0.238686
LOG(AK)	0.264307	0.238686	1.000000

Sumber: *Print-out* Program Eviews

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *White*. Nilai *chi-square* hitung pada model diatas sebesar 29,22 yang diperoleh dari informasi *Obs\*R-squared*. Nilai *chi-square* kritis untuk  $df = 9$  dan tingkat kepercayaan 95 persen adalah 16,91. Hasil perhitungan menunjukkan nilai *chi-square* hitung lebih besar dari nilai *chi-square* kritis. Artinya, terdapat heteroskedastisitas pada model.

Penyembuhan masalah heteroskedastisitas pada model dapat menggunakan metode *White* yang terdapat pada program Eviews. Penyembuhan dengan metode *White* dilakukan melalui perbaikan terhadap standar error (*heteroskedasticity-corrected standard errors*). Dengan adanya tindakan penyembuhan tersebut, maka model telah berhasil menghilangkan masalah heteroskedastisitas sehingga mampu menghasilkan parameter yang *BLUE*.

Hasil estimasi model setelah mengalami penyembuhan dengan tingkat kepercayaan 95 sebagaimana terlihat pada tabel 4.3. di bawah ini.

Tabel 4.3. Hasil Regresi Model Tahap Kedua

Variabel	LOG(PDRB)		
	Koefisien	t-statistic	Probability t-test
C	2.186297	2.657906	0.0083
LOG(BMP)	0.081034	3.806279	0.0002
LOG(BMD)	0.199537	2.748062	0.0063
LOG(BMD)*DI	0.069073	6.649514	0.0000
LOG(AK)	0.805895	20.50206	0.0000
R-Squared	0.709550	F-statistic	189.9378
Adj R-Squared	0.705814	Prob(F-statistic)	0.000000
Durbin-Watson stat	1.704858	N	316

Sumber: *Print-out Program Eviews*

Hasil regresi data menghasilkan model *output* ekonomi daerah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LnPDRB} = & 2,186 + 0,081\text{LnBMP} + 0,199\text{LnBMD} + 0,268\text{LnBMD*DI} \\ & + 0,805\text{LnAK} \end{aligned}$$

Berdasarkan model *output* ekonomi daerah di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- BMP bersifat *inelastis* terhadap PDRB kabupaten/kota. Peningkatan BMP sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota sebesar 0,081 persen.
- BMD bersifat *inelastis* terhadap PDRB kabupaten/kota. Peningkatan BMD sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota sebesar 0,199 persen.
- BMD lebih *elastis* dari BMP. BMD memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap PDRB kabupaten/kota dari pada BMP.
- Peningkatan BMD sebesar 1 persen *ceteris paribus* dari kabupaten/kota yang memiliki realisasi dana bagi hasil di atas rata-rata akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota dimaksud sebesar 0,268 persen.

- e. AK bersifat *inelastis* terhadap PDRB kabupaten/kota. Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 persen *ceteris paribus* akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota sebesar 0,805 persen.
- f. Variabel bebas mampu menjelaskan varian PDRB sebesar 70,95 persen, sedangkan sisanya sebesar 29,05 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada model.

#### 4.3. Analisis Hasil Estimasi Model

Peningkatan realisasi belanja modal pemerintah pusat sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota sebesar 0,054 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh investasi pemerintah pusat pada tahun 2006 melalui realisasi belanja modal pada tahun 2005 relatif kecil terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006. Rendahnya pengaruh investasi pemerintah pusat terhadap PDRB kabupaten/kota diakibatkan relatif kecilnya realisasi belanja modal pemerintah pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya daya serap anggaran belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2005, yaitu sebesar Rp.32,9 triliun atau 58,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp.56,5 triliun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (*audited*), rendahnya daya serap anggaran belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2005 diakibatkan dimulainya pelaksanaan sistem anggaran terpadu (*unified budget*) pada tahun 2005. Dalam sistem anggaran terpadu tidak dibedakan lagi antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang mengakibatkan terlambatnya pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini mengakibatkan realisasi belanja pemerintah pusat jauh di bawah yang dianggarkan dalam APBN tahun 2005.

Peningkatan realisasi belanja modal pemerintah daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota sebesar 0,248 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh investasi pemerintah daerah pada tahun 2006

melalui realisasi belanja modal pada tahun 2005 relatif kecil terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006. Sama halnya dengan pemerintah pusat, rendahnya pengaruh investasi pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota diakibatkan relatif kecilnya realisasi belanja modal pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya daya serap anggaran belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2005.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan Bank Indonesia, sebagian besar daerah menghadapi tiga permasalahan yang mengakibatkan rendahnya daya serap anggaran belanja modal pada tahun 2005. *Pertama*, inefisiensi birokrasi yang mengakibatkan terlambatnya pengesahan APBD dalam kaitannya dengan lamanya proses legislasi di tingkat daerah. *Kedua*, faktor ekonomi yang mengakibatkan berubahnya skala prioritas pembiayaan. Rangkaian bencana alam yang melanda beberapa daerah mendorong pergeseran skala prioritas dari rencana pelaksanaan anggaran semula. *Ketiga*, faktor politik terkait dengan dinamika pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang mengurangi konsentrasi pejabat daerah dalam merealisasikan anggaran belanja modal.

Realisasi belanja modal pemerintah daerah ternyata memiliki pengaruh lebih besar dari pada realisasi belanja modal pemerintah pusat terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih efisien dalam merealisasikan belanja modal dibandingkan dengan pemerintah pusat. Artinya, realisasi belanja modal pemerintah daerah lebih diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini diakibatkan pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Hasil ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien akan tercapai apabila diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum.

Namun demikian, pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah lebih besar pada kabupaten/kota yang memiliki realisasi dana bagi hasil di atas rata-rata. Pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di atas rata-rata memiliki pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB

kabupaten/kota pada tahun 2006 sebesar 0,310 atau lebih besar 0,070 persen dari pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kapasitas fiskal pemerintah daerah akan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengalokasian belanja modal.

Peningkatan angkatan kerja sebesar 1 persen akan meningkatkan PDRB kabupaten/kota sebesar 0,788 persen. Hal ini menunjukkan pengaruh tenaga kerja pada tahun 2006 relatif besar dan dominan terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006. Tingginya pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB kabupaten/kota diakibatkan pada umumnya sektor produksi yang terdapat di kabupaten/kota termasuk sektor produksi padat karya yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.

Variabel bebas mampu menjelaskan varian PDRB sebesar 70,95 persen, sedangkan sisanya sebesar 29,05 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada model. Apabila dilihat dari fungsi produksi, maka variabel lain yang dapat menjelaskan varian PDRB adalah investasi swasta dan teknologi. Namun adanya kendala dalam menilai variabel-variabel tersebut secara kuantitatif mengakibatkan variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan ke dalam model menjadi variabel penjelas.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaruh realisasi belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2005 terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006 sebesar 0,081 persen. Rendahnya pengaruh realisasi belanja modal pemerintah pusat terhadap PDRB kabupaten/kota diakibatkan relatif kecilnya realisasi belanja modal pemerintah pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya daya serap anggaran belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2005 yang diakibatkan dimulainya pelaksanaan sistem anggaran terpadu (*unified budget*) pada tahun 2005.
- b. Pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2005 terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006 sebesar 0,199 persen. Rendahnya pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota diakibatkan relatif kecilnya realisasi belanja modal pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya daya serap anggaran belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2005 yang disebabkan rendahnya daya serap anggaran belanja modal akibat dari inefisiensi birokrasi, berubahnya skala prioritas pembiayaan, dan faktor politik terkait dengan dinamika pemilihan Kepala Daerah (pilkada).
- c. Pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2005 terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006 ternyata lebih besar dari pada pengaruh realisasi belanja modal pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih efisien dalam mengalokasikan belanja modal dibandingkan dengan pemerintah pusat. Hasil ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien akan tercapai apabila

diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum.

- d. Pemerintah daerah yang realisasi dana bagi hasilnya di atas rata-rata memiliki pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah pada tahun 2006 terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006 sebesar 0,268 atau lebih besar 0,069 dari pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kapasitas fiskal pemerintah daerah akan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengalokasian belanja modal.
- e. Pengaruh tenaga kerja pada tahun 2006 terhadap PDRB kabupaten/kota pada tahun 2006 sebesar 0,805 persen. Tingginya pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB kabupaten/kota diakibatkan pada umumnya sektor produksi yang terdapat di kabupaten/kota termasuk sektor produksi padat karya yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
- f. Variabel bebas mampu menjelaskan varian variabel terikat sebesar 70,95 persen, sedangkan sisanya sebesar 29,05 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada model. Apabila dilihat dari fungsi produksi, maka variabel lain yang dapat menjelaskan varian PDRB adalah investasi swasta dan teknologi.

## 5.2. Saran

Adapun saran dalam rangka kemungkinan pengembangan hasil penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dilakukan hanya pada tahun 2006 karena keterbatasan data yang tersedia. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan gambaran yang lebih nyata dari pengaruh investasi pemerintah melalui realisasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penelitian ini tidak memberikan gambaran secara rinci mengenai jenis infrastruktur yang merupakan investasi pemerintah. Penelitian selanjutnya perlu melakukan analisis terhadap masing-masing jenis infrastruktur sehingga

dapat diperoleh gambaran mengenai jenis infrastruktur yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- c. Penelitian ini tidak memasukkan faktor investasi swasta berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, dan faktor teknologi yang dapat diasumsikan berupa manajemen pemerintahan dan teknologi produksi. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan faktor barang modal swasta dan faktor teknologi sebagai variabel penjelas sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun saran dari penelitian ini terhadap para pengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah adalah:

- a. Pemerintah daerah lebih efisien dalam merealisasikan belanja modal dibandingkan dengan pemerintah pusat. Hal ini merupakan suatu dukungan terhadap pelaksanaan desentralisasi yang harus terus dikembangkan seiring dengan peningkatan transfer ke daerah setiap tahunnya melalui APBN.
- b. Kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2001 telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan besar dalam upaya penciptaan iklim investasi swasta yang kondusif di daerahnya. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi swasta di daerahnya masing-masing melalui penyediaan infrastruktur yang dapat menambah daya tarik investasi swasta.
- c. Kapasitas fiskal yang relatif besar yang didasarkan pada realisasi dana bagi hasil ternyata memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi daerah.
- d. Tingginya pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB kabupaten/kota menunjukkan bahwa pada umumnya sektor produksi yang terdapat di kabupaten/kota masih membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Keunggulan dari sisi tenaga kerja harus terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan investasi pemerintah, investasi swasta, dan teknologi.

## DAFTAR REFERENSI

- Abimanyu, Anggito, *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*, Bapekki, Depkeu, 2005.
- Adi, Priyo Hari, *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 2006.
- Akai, N. dan M. Sakata, *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States*, *Journal of Urban Economics*, Vol. 52, 2002.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan, *Dasar-dasar Keuangan Publik*, LPKPAP-BPPK, 2004.
- Bahl, R., *Decentralization in Indonesia: Prospects and Problems*, Department of Economics, Georgia: The School of Policy Studies, Georgia State University.
- Bardhan, Pranab, *The Role of Governance in Economic Development, A Political Economy Approach*, OECD Development Center, 1997.
- Bird, Richard M., dan Vaillancourt. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Chu, Ke-young, S. Gupta, B. Clements and D. Hewitt, *Unproductive Public Expenditures: A Pragmatic Approach to Policy Analysis*, Fiscal Affairs Department, Washington DC: International Monetary Fund, 1995
- Dillinger, William, *Urban Property Taxation in Developing Countries*, Washington D.C.: World Bank, 1994.
- Gujarati, Damodar N., *Basic Econometrics Third Edition*, McGraw-Hill Inc, New York, 1995.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 dan 2006 (*audited*).
- Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2006, Bank Indonesia, 2007.
- Mankiw, N.G., *Macroeconomics* (6th), New York: Worth Publishers, 2006.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave Peggy B., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.

- Mandala M., Prathama R., *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berbagai tahun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, 2003.
- Sidik, Machfud, Brodjonegoro B., Mahi R., Simanjuntak, *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh Jilid 1 dan 2, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## Lampiran 1. Hasil Estimasi Model Tahap Pertama

Dependent Variable: LOG(PDRB)

Method: Least Squares

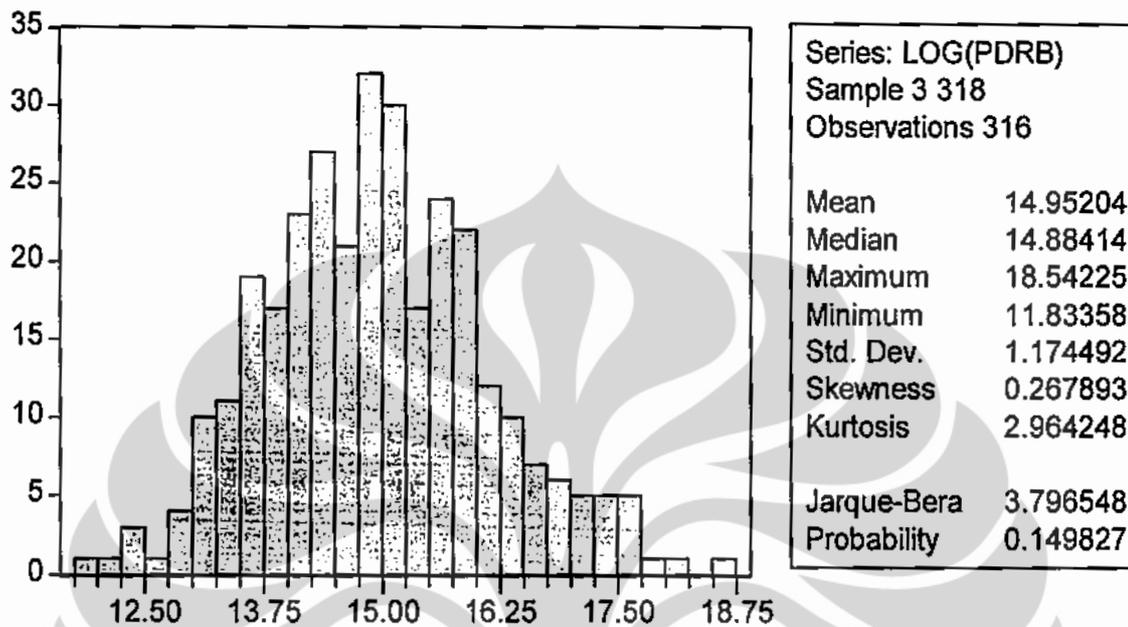
Date: 12/30/08 Time: 16:35

Sample(adjusted): 3 318

Included observations: 316 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.186297	0.822564	2.657906	0.0083
LOG(BMP)	0.081034	0.021289	3.806279	0.0002
LOG(BMD)	0.199537	0.072610	2.748062	0.0063
LOG(BMD)*D1	0.069073	0.010388	6.649514	0.0000
LOG(AK)	0.805895	0.039308	20.50206	0.0000
R-squared	0.709550	Mean dependent var		14.95204
Adjusted R-squared	0.705814	S.D. dependent var		1.174492
S.E. of regression	0.637031	Akaike info criterion		1.951701
Sum squared resid	126.2066	Schwarz criterion		2.011127
Log likelihood	-303.3687	F-statistic		189.9378
Durbin-Watson stat	1.704858	Prob(F-statistic)		0.000000

## Lampiran 2. Hasil Jarque Berra (JB test)



### Lampiran 3. Hasil White Heteroskedasticity Test

#### White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.910450	Probability	0.000205
Obs*R-squared	29.22287	Probability	0.000290

#### Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/30/08 Time: 16:49

Sample: 3 318

Included observations: 316

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.11565	17.74420	1.246360	0.2136
LOG(BMP)	0.261594	0.215826	1.212059	0.2264
(LOG(BMP))^2	-0.014007	0.011212	-1.249324	0.2125
LOG(BMD)	-3.106798	2.843191	-1.092715	0.2754
(LOG(BMD))^2	0.154940	0.134981	1.147868	0.2519
LOG(BMD)*D1	0.187008	0.324513	0.576271	0.5649
(LOG(BMD)*D1)^2	-0.014674	0.029307	-0.500704	0.6169
LOG(AK)	-1.002933	1.392725	-0.720123	0.4720
(LOG(AK))^2	0.031425	0.057472	0.546792	0.5849
R-squared	0.092477	Mean dependent var		0.399388
Adjusted R-squared	0.068829	S.D. dependent var		1.015914
S.E. of regression	0.980329	Akaike info criterion		2.826210
Sum squared resid	295.0407	Schwarz criterion		2.933178
Log likelihood	-437.5412	F-statistic		3.910450
Durbin-Watson stat	1.794679	Prob(F-statistic)		0.000205

#### Lampiran 4. Hasil estimasi Model Tahap Kedua

Dependent Variable: LOG(PDRB)

Method: Least Squares

Date: 12/30/08 Time: 16:52

Sample(adjusted): 3 318

Included observations: 316 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.186297	0.901558	2.425022	0.0159
LOG(BMP)	0.081034	0.019665	4.120764	0.0000
LOG(BMD)	0.199537	0.087438	2.282046	0.0232
LOG(BMD)*D1	0.069073	0.012556	5.501132	0.0000
LOG(AK)	0.805895	0.044498	18.11066	0.0000
R-squared	0.709550	Mean dependent var		14.95204
Adjusted R-squared	0.705814	S.D. dependent var		1.174492
S.E. of regression	0.637031	Akaike info criterion		1.951701
Sum squared resid	126.2066	Schwarz criterion		2.011127
Log likelihood	-303.3687	F-statistic		189.9378
Durbin-Watson stat	1.704858	Prob(F-statistic)		0.000000

## LAMPIRAN 5. DATA REGRESI

No.	Daerah	PDRB Harga Berlaku 2006 (Rp. juta)	Belanja Modal Realisasi APBN 2005 (Rp. juta)	Belanja Modal Realisasi APBD 2005 (Rp. juta)	Angkatan Kerja 2006 (orang)	Realisasi Dana Bagi Hasil 2005 (Rp. juta)
1	Kab. Aceh Besar	3,011,379.89	22,069.18	19,897.87	134,913	65,406.62
2	Kab. Aceh Selatan	1,629,627.66	9,227.98	26,379.62	81,544	62,585.57
3	Kab. Aceh Singkil	469,499.41	7,850.60	45,541.70	57,438	31,982.96
4	Kab. Aceh Tengah	1,347,163.11	10,693.73	37,300.54	77,276	33,434.63
5	Kab. Aceh Tenggara	749,765.38	11,979.48	32,521.51	75,915	65,676.95
6	Kab. Aceh Utara	15,272,146.11	12,640.82	192,107.32	200,319	546,983.93
7	Kab. Pidie	1,890,165.63	11,103.37	30,972.14	213,512	46,974.14
8	Kota Banda Aceh	2,389,815.70	888,230.76	35,338.08	74,620	52,472.66
9	Kota Langsa	1,098,130.86	12,959.72	20,500.95	58,021	40,244.99
10	Kota Lhokseumawe	12,493,939.13	20,781.10	47,578.23	57,340	66,873.26
11	Kab. Aceh Barat Daya	872,914.42	106.00	32,612.72	47,348	45,886.38
12	Kab. Aceh Tamiang	2,735,672.45	101.62	42,599.76	97,461	95,047.17
13	Kab. Asahan	6,650,339.19	4,610.23	64,159.83	460,723	48,753.10
14	Kab. Dairi	2,552,751.94	1,395.25	14,173.66	149,596	14,660.18
15	Kab. Deli Serdang	21,800,417.13	33,598.27	31,423.77	754,770	67,698.94
16	Kab. Labuhan Batu	12,564,460.07	15,673.85	59,565.27	403,104	60,917.97
17	Kab. Langkat	9,579,479.91	2,428.26	84,881.03	461,988	93,538.40
18	Kab. Mandailing Natal	2,260,838.78	1,531.04	45,525.27	197,013	19,997.95
19	Kab. Simalungun	6,843,957.50	1,243.55	38,554.30	416,598	37,508.77
20	Kota Binjai	2,889,991.13	6,695.47	24,041.26	108,285	26,230.14
21	Kota Medan	48,922,904.15	1,078,935.82	194,497.82	969,864	194,341.29
22	Kota Pematang Siantar	2,865,618.86	2,466.06	35,617.17	104,310	16,783.28
23	Kota Sibolga	931,522.92	3,354.60	35,752.74	37,740	13,515.35
24	Kota Tanjung Balai	1,972,647.91	3,719.09	44,225.25	65,531	11,756.48
25	Kota Tebing Tinggi	1,417,741.56	2,351.64	39,270.30	59,943	14,004.82
26	Kota Padang Sidempuan	1,318,274.05	19,920.18	24,768.28	78,390	18,356.26
27	Kab. Humbang Hasundutan	1,535,581.53	466.50	30,016.19	81,371	11,053.78
28	Kab. Lima Puluh Kota	3,650,211.43	3,364.17	22,180.83	148,673	18,891.67
29	Kab. Agam	3,924,766.90	4,284.77	14,721.93	190,254	15,026.03
30	Kab. Padang Pariaman	3,890,122.59	5,037.06	51,603.03	157,069	13,165.91
31	Kab. Pasaman	1,878,260.09	24,075.03	18,513.68	121,482	21,955.38
32	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	1,816,580.00	34,881.93	31,945.59	84,589	14,670.50
33	Kab. Solok	2,888,476.62	4,756.01	26,963.22	166,730	15,508.49
34	Kab. Tanah Datar	3,394,755.57	4,132.27	43,250.18	150,110	21,983.44
35	Kota Bukit Tinggi	1,268,658.90	265,934.93	25,126.56	49,873	10,915.57
36	Kota Padang Panjang	549,189.83	8,410.74	42,819.50	22,377	10,804.67
37	Kota Padang	15,294,258.13	287,602.85	34,559.48	351,813	32,668.49
38	Kota Payakumbuh	1,132,578.99	3,443.16	38,678.12	48,601	11,411.20
39	Kota Sawahlunto	676,876.48	1,803.29	26,354.90	25,032	13,662.99
40	Kota Solok	675,828.39	957.63	27,155.60	23,520	10,728.97
41	Kota Pariaman	1,019,916.99	1,863.96	46,906.01	28,730	10,387.82
42	Kab. Bengkalis	47,301,937.54	8,878.49	677,426.52	289,111	1,489,874.62
43	Kab. Indragiri Hilir	12,032,210.77	8,778.73	138,585.18	300,419	329,030.17
44	Kab. Kampar	13,029,787.68	17,538.25	214,670.70	222,341	687,246.81
45	Kab. Kuantan Singingi	6,648,444.07	15,109.62	131,611.81	112,342	315,746.54
46	Kab. Pelalawan	8,380,261.63	6,452.14	190,213.29	102,000	378,545.35
47	Kab. Rokan Hilir	18,350,344.32	9,473.56	120,336.22	160,590	1,020,221.89
48	Kab. Rokan Hulu	6,500,434.91	14,259.62	115,815.59	148,539	371,337.79
49	Kab. Siak	26,192,611.86	2,021.04	499,809.64	117,598	1,025,414.02
50	Kota Dumai	4,933,768.75	25,454.16	96,917.54	91,725	330,934.96
51	Kota Pekanbaru	16,961,564.59	285,802.39	145,492.28	321,182	356,238.73
52	Kab. Batanghari	1,887,868.64	2,990.88	63,743.68	91,261	60,227.95
53	Kab. Bungo	1,813,296.09	5,057.62	44,516.22	124,274	33,599.34
54	Kab. Muaro Jambi	2,135,336.62	3,027.95	78,036.67	141,057	73,154.51
55	Kab. Sarolangun	1,966,628.84	4,210.52	85,312.26	96,940	52,730.04

56	Kab. Tanjung Jabung Barat	3,363,662.83	4,169.84	77,779.17	112,416	85,875.88
57	Kab. Tebo	1,367,444.35	3,479.34	61,919.50	116,940	32,447.94
58	Kota Jambi	4,903,772.75	321,871.28	52,397.76	186,107	62,885.08
59	Kab. Lahat	3,427,272.00	2,389.65	82,503.89	285,148	140,655.83
60	Kab. Musi Banyuasin	18,963,005.00	2,910.36	237,130.61	252,360	675,975.19
61	Kab. Musi Rawas	4,686,125.00	2,056.68	83,891.07	231,723	178,292.09
62	Kab. Muara Enim	13,191,094.00	3,430.51	124,909.36	328,373	178,268.61
63	Kab. Ogan Komering Ilir	4,106,422.00	3,847.98	67,937.57	348,274	87,627.80
64	Kab. Ogan Komering Ulu	3,652,873.00	1,843.30	31,222.82	116,881	117,247.73
65	Kota Palembang	29,589,817.00	752,095.22	124,132.83	581,879	146,660.07
66	Kota Prabumulih	1,862,464.00	1,024.71	78,178.23	61,135	104,775.79
67	Kota Lubuk Linggau	1,297,623.00	1,172.96	51,456.91	80,713	94,416.05
68	Kab. Banyuasin	7,029,269.00	16,418.79	58,022.61	384,699	152,286.94
69	Kab. Rejang Lebong	2,281,347.00	16,401.38	20,912.63	126,480	12,888.53
70	Kota Bengkulu	3,043,244.85	228,343.47	44,815.39	117,008	13,741.85
71	Kab. Kaur	355,412.00	3,199.51	24,878.13	53,669	13,624.72
72	Kab. Mukomuko	813,565.00	20,206.78	40,500.15	58,255	8,377.47
73	Kab. Kepahiang	983,887.00	1,131.96	9,348.73	58,953	7,936.26
74	Kab. Lampung Barat	1,488,369.68	502.68	53,329.67	195,588	37,805.27
75	Kab. Lampung Selatan	6,815,324.31	21,062.39	30,056.27	606,815	52,777.29
76	Kab. Lampung Tengah	7,638,198.71	6,644.27	34,353.62	537,966	57,189.91
77	Kab. Tanggamus	4,063,251.03	8,698.02	50,319.59	397,081	19,829.60
78	Kab. Tulang Bawang	6,489,252.27	2,482.84	60,407.73	326,274	42,878.22
79	Kab. Way Kanan	1,578,372.72	1,978.44	37,460.47	194,209	46,084.22
80	Kota Bandar Lampung	8,008,949.14	574,198.58	52,819.41	364,748	60,218.04
81	Kota Metro	647,647.05	6,015.68	27,240.65	61,161	38,173.92
82	Kab. Bandung	29,431,046.06	20,820.22	60,241.20	1,867,099	99,674.42
83	Kab. Bekasi	66,239,906.50	19,554.23	235,445.80	904,809	284,097.34
84	Kab. Bogor	44,792,697.65	117,764.49	248,885.10	1,656,174	156,199.08
85	Kab. Ciamis	10,781,601.90	10,850.00	55,569.65	762,932	36,439.79
86	Kab. Cianjur	12,500,528.11	5,903.06	69,902.44	942,483	56,139.05
87	Kab. Cirebon	11,289,660.24	25,258.94	78,157.96	941,497	48,745.21
88	Kab. Indramayu	31,895,387.37	21,974.06	72,990.56	821,783	133,568.07
89	Kab. Karawang	31,503,238.21	226,854.84	114,021.71	913,429	186,788.98
90	Kab. Kuningan	5,422,816.05	6,178.50	37,002.49	528,945	34,557.18
91	Kab. Majalengka	5,904,319.41	23,500.43	39,065.55	566,382	55,831.51
92	Kab. Purwakarta	9,698,906.14	383,867.22	31,500.00	344,563	55,326.34
93	Kab. Subang	10,700,785.96	25,558.29	144,888.21	661,137	95,872.19
94	Kab. Sumedang	8,066,643.34	43,725.53	70,276.80	499,119	38,883.42
95	Kab. Tasikmalaya	8,183,081.48	10,012.68	88,496.67	268,700	37,511.68
96	Kota Bandung	43,491,378.40	861,305.39	106,350.31	1,121,526	227,828.87
97	Kota Bekasi	22,855,154.21	52,298.11	242,976.68	891,040	253,167.73
98	Kota Cirebon	7,975,811.50	205,299.29	31,551.96	148,068	37,602.17
99	Kota Depok	8,967,779.01	7,386.68	143,705.12	623,027	101,153.42
100	Kota Sukabumi	2,863,431.70	14,328.38	38,844.35	125,930	26,475.85
101	Kota Tasikmalaya	5,512,622.45	8,243.78	60,747.72	268,700	26,498.64
102	Kota Cimahi	8,187,144.24	1,158.71	71,926.59	260,910	58,162.33
103	Kab. Banjarnegara	4,156,373.77	2,211.94	59,073.41	457,200	25,095.70
104	Kab. Banyumas	6,428,219.55	17,436.43	59,630.66	719,710	35,664.86
105	Kab. Batang	3,503,532.46	649.06	42,057.44	351,312	21,394.41
106	Kab. Blora	2,873,717.60	19,347.63	31,474.17	466,299	43,398.04
107	Kab. Boyolali	5,142,433.03	2,087.50	57,414.55	542,978	23,131.62
108	Kab. Brebes	8,402,057.26	1,414.04	63,104.98	890,093	31,214.42
109	Kab. Cilacap	61,836,966.69	35,777.97	72,907.38	770,130	45,185.09
110	Kab. Demak	3,977,180.34	2,312.89	22,725.65	549,666	22,329.70
111	Kab. Grobogan	4,019,839.80	2,731.47	70,325.98	722,518	29,003.02
112	Kab. Jepara	5,677,316.95	3,997.65	56,650.37	537,626	26,391.29
113	Kab. Karanganyar	6,224,781.85	2,161.39	63,466.26	441,039	25,391.75
114	Kab. Kebumen	4,082,203.22	107,432.93	41,117.01	573,065	24,082.64
115	Kab. Kendal	6,867,673.66	1,695.05	70,714.54	514,040	24,139.95
116	Kab. Klaten	7,504,499.43	9,415.74	31,048.53	626,830	27,872.17

117	Kab. Kudus	21,378,989.39	17,167.19	104,825.90	447,437	34,646.28
118	Kab. Magelang	5,252,845.84	6,258.32	48,151.04	649,588	24,997.17
119	Kab. Pati	6,033,083.05	4,714.34	51,851.41	635,997	25,266.91
120	Kab. Pekalongan	4,568,470.99	3,973.37	37,682.48	451,914	18,664.98
121	Kab. Pemalang	5,178,579.01	1,549.18	31,937.84	668,850	25,110.46
122	Kab. Purbalingga	3,408,083.52	9,798.01	38,162.56	407,826	19,575.01
123	Kab. Purworejo	4,094,294.69	6,156.64	32,664.49	362,803	20,004.07
124	Kab. Rembang	3,214,593.95	2,262.75	15,857.61	300,142	21,868.43
125	Kab. Semarang	7,340,034.64	65,068.97	32,435.79	513,001	23,465.02
126	Kab. Sragen	4,042,161.37	1,954.14	57,196.31	478,410	20,979.57
127	Kab. Sukoharjo	6,277,623.81	26,380.02	31,152.65	454,194	27,700.95
128	Kab. Tegal	4,380,578.68	2,411.85	72,208.00	670,283	20,962.55
129	Kab. Temanggung	3,214,621.57	3,914.20	21,025.35	394,320	18,636.01
130	Kab. Wonosobo	2,630,137.88	1,174.04	72,702.21	387,040	20,736.31
131	Kota Magelang	1,420,428.21	4,250.32	22,200.07	66,712	12,992.02
132	Kota Pekalongan	2,709,378.04	16,921.81	29,859.78	134,285	17,582.31
133	Kota Salatiga	1,105,964.15	5,296.64	35,315.94	86,595	15,412.53
134	Kota Semarang	25,998,715.49	762,645.03	32,978.04	735,254	233,694.83
135	Kota Surakarta	6,190,112.55	27,190.90	10,175.44	266,742	37,250.12
136	Kota Tegal	1,660,905.53	9,999.15	50,129.09	116,951	19,117.66
137	Kab. Bantul	5,725,365.81	9,887.83	34,173.51	418,012	24,902.96
138	Kab. Gunung Kidul	4,390,868.77	4,121.86	30,772.74	422,152	15,621.86
139	Kab. Kulon Progo	2,414,959.90	4,831.65	12,963.81	196,352	13,854.26
140	Kab. Sleman	8,902,448.99	139,421.20	73,597.57	513,056	46,647.02
141	Kota Yogyakarta	7,763,932.53	380,498.75	70,187.65	225,230	39,446.43
142	Kab. Bangkalan	4,917,789.08	14,607.83	59,745.23	468,220	42,784.00
143	Kab. Banyuwangi	13,440,414.97	9,036.22	46,258.94	796,980	35,762.05
144	Kab. Blitar	7,851,107.01	4,953.62	49,022.92	569,242	21,319.41
145	Kab. Bojonegoro	8,685,484.72	25,273.74	89,242.36	680,379	50,517.73
146	Kab. Bondowoso	3,194,870.04	7,570.11	28,562.87	366,419	16,479.59
147	Kab. Gresik	20,990,490.43	6,859.07	47,399.93	569,081	68,440.44
148	Kab. Jember	14,368,695.65	20,687.10	78,422.60	1,133,232	37,389.42
149	Kab. Jombang	8,565,594.94	2,084.29	39,877.12	621,306	28,989.13
150	Kab. Kediri	8,800,596.89	8,289.01	53,818.56	762,839	32,261.88
151	Kab. Lamongan	6,613,517.74	21,743.75	41,633.77	643,413	29,572.50
152	Kab. Lumajang	8,457,897.19	9,471.35	50,227.72	527,494	20,596.87
153	Kab. Madiun	3,940,742.15	3,789.75	42,547.88	343,539	21,921.65
154	Kab. Magetan	4,470,724.52	1,454.60	50,824.21	371,553	23,528.19
155	Kab. Malang	19,015,576.65	48,030.56	42,878.71	1,269,987	42,674.59
156	Kab. Mojokerto	8,479,282.24	7,375.80	24,948.81	509,488	32,048.30
157	Kab. Nganjuk	6,379,582.96	5,726.43	71,179.89	506,379	23,680.07
158	Kab. Ngawi	4,445,555.03	2,716.67	16,620.53	439,232	38,141.43
159	Kab. Pacitan	2,136,638.05	3,637.14	20,285.07	327,920	17,830.99
160	Kab. Pamekasan	2,962,126.27	16,239.30	42,963.78	424,368	28,436.08
161	Kab. Pasuruan	9,371,024.86	7,011.45	48,375.39	720,140	50,064.83
162	Kab. Ponorogo	4,396,397.29	10,971.45	29,049.59	470,528	27,350.46
163	Kab. Probolinggo	9,138,252.92	7,469.61	50,058.74	543,216	33,443.96
164	Kab. Sampang	3,729,643.23	4,981.32	68,357.89	403,168	33,262.08
165	Kab. Sidoarjo	36,559,900.17	54,818.94	141,577.98	826,433	127,648.96
166	Kab. Situbondo	5,104,295.42	8,640.27	19,268.90	319,626	20,906.44
167	Kab. Sumenep	7,520,877.28	7,944.31	75,357.56	609,407	84,681.59
168	Kab. Trenggalek	2,637,992.14	11,934.05	38,181.29	366,575	20,663.51
169	Kab. Tuban	8,994,582.68	4,711.22	141,220.02	541,620	58,445.69
170	Kab. Tulungagung	9,884,748.86	34,821.10	14,236.70	532,235	26,399.45
171	Kota Blitar	979,832.97	7,622.09	31,085.65	61,056	12,645.08
172	Kota Kediri	37,743,633.06	20,929.54	29,482.72	139,590	22,065.42
173	Kota Madiun	1,725,104.14	21,888.17	54,977.88	93,378	20,279.96
174	Kota Malang	18,191,418.82	73,163.63	69,529.74	406,201	42,946.55
175	Kota Pasuruan	1,602,038.06	18,074.94	31,086.73	80,402	14,452.26
176	Kota Probolinggo	2,945,658.55	3,090.27	28,801.71	96,224	17,638.77
177	Kota Surabaya	112,926,943.70	1,375,660.32	206,156.77	1,310,098	392,451.39

178	Kota Batu	1,758,225.38	3,276.39	34,585.46	91,830	16,387.37
179	Kab. Bengkayang	1,465,153.37	2,358.41	42,832.30	90,969	15,726.23
180	Kab. Landak	1,929,185.80	2,603.29	49,174.70	147,494	22,152.16
181	Kab. Kapuas Hulu	1,566,806.22	13,102.16	51,364.11	121,869	33,198.19
182	Kab. Ketapang	3,890,803.55	14,110.80	104,095.60	226,350	38,439.94
183	Kab. Pontianak	6,632,973.51	4,604.79	50,754.28	226,350	22,956.58
184	Kab. Sambas	3,618,691.19	17,932.25	39,041.04	334,190	20,825.55
185	Kab. Sanggau	3,370,730.32	6,502.74	50,320.75	205,188	27,627.83
186	Kab. Sintang	1,379,806.25	7,941.34	35,797.26	188,956	22,901.67
187	Kota Pontianak	7,555,118.47	272,367.16	29,474.21	226,256	37,722.49
188	Kota Singkawang	1,577,716.70	4,479.96	35,676.74	70,234	14,881.91
189	Kab. Barito Selatan	1,316,883.76	1,767.89	43,744.58	60,607	42,389.43
190	Kab. Kapuas	2,879,257.53	47,300.36	78,981.45	186,330	25,322.38
191	Kab. Kotawaringin Barat	2,930,376.41	2,213.55	95,889.10	96,736	23,004.22
192	Kab. Kotawaringin Timur	4,554,360.91	9,461.91	76,942.68	142,420	36,332.97
193	Kota Palangka Raya	2,045,243.28	209,427.53	28,856.07	73,372	18,988.94
194	Kab. Katingan	1,695,541.80	1,136.21	89,171.48	60,692	33,601.41
195	Kab. Lamandau	693,032.38	717.68	60,195.77	20,862	25,045.43
196	Kab. Gunung Mas	838,537.18	1,141.59	69,377.21	41,280	26,890.62
197	Kab. Pulang Pisau	834,980.90	1,827.10	63,120.16	60,208	19,025.86
198	Kab. Barito Timur	881,049.60	4,229.21	50,250.66	43,654	49,028.40
199	Kab. Banjar	3,739,481.54	6,556.26	35,533.23	245,760	50,752.81
200	Kab. Barito Kuala	2,585,754.53	3,471.60	68,903.90	142,088	27,845.81
201	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,321,925.74	1,823.58	27,390.31	105,212	34,296.70
202	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,218,716.41	2,963.11	30,896.99	123,756	31,075.61
203	Kab. Hulu Sungai Utara	919,030.22	596.44	32,725.25	110,484	57,720.15
204	Kab. Kota Baru	5,646,241.73	4,254.55	13,974.94	123,660	89,255.86
205	Kab. Tabalong	3,122,077.93	3,083.11	33,517.84	99,636	103,242.67
206	Kab. Tanah Laut	2,608,656.82	12,703.37	34,370.92	134,256	62,848.71
207	Kab. Tapin	1,074,031.43	6,228.30	49,324.62	78,478	37,200.98
208	Kota Banjar Baru	1,117,642.70	25,650.95	38,938.83	72,140	32,413.41
209	Kota Banjarmasin	5,575,753.62	245,495.28	49,415.33	276,710	42,345.80
210	Kab. Balangan	1,748,416.27	200.00	40,261.19	48,465	73,722.90
211	Kab. Malinau	137,802.27	3,006.04	192,294.13	24,592	401,598.00
212	Kab. Pasir	247,147.00	2,812.97	134,463.76	78,884	429,438.83
213	Kota Balikpapan	18,324,441.62	111,274.89	100,986.71	215,173	507,263.53
214	Kota Bontang	49,988,669.06	963.99	208,861.13	50,369	450,716.15
215	Kota Samarinda	3,993,782.01	290,509.72	114,873.83	252,211	457,213.84
216	Kab. Penajam Paser Utara	2,049,446.00	802.00	230,786.05	56,434	460,787.20
217	Kab. Bolaang Mongondow	1,773,808.70	31,793.11	34,677.35	210,113	23,485.83
218	Kab. Minahasa	2,521,358.68	42,238.92	36,687.86	144,900	13,432.23
219	Kab. Sangihe Talaud	803,731.49	210.00	47,815.05	90,888	15,949.60
220	Kab. Kepulauan Talaud	512,253.54	28,836.66	41,067.97	33,000	10,688.90
221	Kab. Minahasa Selatan	1,524,415.42	400.00	13,059.01	130,769	12,410.32
222	Kota Tomohon	773,705.53	10.00	37,382.08	38,941	14,140.70
223	Kab. Banggai	2,087,578.05	8,503.50	36,215.25	140,626	21,830.46
224	Kab. Buol	721,446.26	5,766.68	24,379.08	45,224	14,411.06
225	Kota Palu	3,324,564.68	189,581.97	43,428.12	129,949	24,453.24
226	Kab. Parigi Moutong	3,462,071.02	2,489.85	44,036.88	162,563	12,610.72
227	Kab. Bantaeng	899,110.16	1,033.64	45,073.33	86,160	17,259.50
228	Kab. Barru	892,995.85	5,360.08	54,092.02	63,520	16,439.83
229	Kab. Bone	3,860,830.96	19,028.57	62,400.17	312,696	29,087.92
230	Kab. Bulukumba	1,975,945.09	5,667.06	27,238.56	167,703	19,939.22
231	Kab. Gowa	2,457,655.41	22,498.52	48,945.53	253,238	21,502.75
232	Kab. Jeneponto	1,144,418.55	4,133.00	61,426.62	137,207	17,229.48
233	Kab. Luwu Utara	1,601,070.50	8,638.93	31,562.24	123,384	23,441.34
234	Kab. Maros	1,344,212.53	5,948.30	38,772.60	124,164	17,484.03
235	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,735,861.55	3,289.79	37,967.96	124,180	15,137.94
236	Kab. Pinrang	2,685,110.14	69,159.75	47,214.22	138,638	20,213.38
237	Kab. Selayar	562,735.41	5,136.80	35,990.72	50,580	17,822.78
238	Kab. Sidenreng Rappang	1,729,724.60	6,402.55	53,802.45	102,356	34,283.33

239	Kab. Sinjai	1,393,405.06	20,950.06	42,727.42	100,669	17,568.70
240	Kab. Soppeng	1,393,497.64	2,041.63	29,968.18	95,973	18,621.92
241	Kab. Takalar	1,111,427.94	3,450.14	27,731.17	109,704	17,252.37
242	Kab. Tana Toraja	1,562,712.50	7,172.50	37,216.39	170,123	18,444.59
243	Kab. Wajo	2,891,508.38	16,514.99	64,775.74	179,105	60,934.70
244	Kota Pare-Pare	891,232.63	15,465.93	40,912.30	46,896	14,885.38
245	Kota Makassar	18,165,876.32	749,161.19	63,110.90	514,696	88,019.90
246	Kota Palopo	1,022,050.15	301.60	38,136.50	54,216	15,957.12
247	Kab. Buton	1,022,138.82	13,290.21	60,910.78	104,310	15,766.20
248	Kab. Kolaka	3,543,201.36	6,003.07	33,682.30	110,778	26,081.17
249	Kota Kendari	2,380,667.48	135,372.56	36,431.75	98,448	18,100.11
250	Kab. Badung	7,706,844.58	17,577.44	109,073.59	227,537	56,880.56
251	Kab. Bangli	1,444,016.88	814.59	14,146.53	119,848	14,192.51
252	Kab. Buleleng	4,486,665.47	13,024.50	33,519.21	338,520	20,668.28
253	Kab. Gianyar	4,181,868.26	6,483.58	26,084.96	237,995	41,643.88
254	Kab. Jembrana	2,228,014.77	3,329.44	32,860.90	136,872	16,027.49
255	Kab. Karangasem	2,423,402.61	3,030.52	20,602.37	217,204	16,394.53
256	Kab. Klungkung	1,643,385.12	2,356.73	36,493.92	97,396	15,171.52
257	Kab. Tabanan	3,087,180.45	4,956.62	13,679.37	228,209	21,254.90
258	Kota Denpasar	7,000,481.89	404,470.94	24,558.82	309,608	53,281.43
259	Kab. Bima	1,842,922.66	24,876.82	26,395.20	184,965	23,721.55
260	Kab. Dompu	1,233,983.50	6,478.61	23,687.65	92,811	24,968.96
261	Kab. Lombok Tengah	2,792,881.65	11,018.05	45,449.54	418,608	30,641.34
262	Kab. Lombok Timur	3,800,882.98	15,785.29	45,245.72	482,858	27,061.82
263	Kab. Sumbawa	2,342,371.29	37,918.34	27,941.90	185,856	30,049.42
264	Kota Mataram	2,600,304.35	175,175.26	56,608.59	161,117	27,177.70
265	Kota Bima	584,474.12	7,036.72	29,242.96	54,897	20,835.55
266	Kab. Sumbawa Barat	10,026,056.89	3,040.00	18,940.77	40,221	83,996.05
267	Kab. Alor	484,823.44	4,225.93	57,535.65	80,610	13,848.36
268	Kab. Ende	902,748.35	75,354.80	26,420.29	121,365	13,264.59
269	Kab. Kupang	899,810.83	126,172.64	27,424.77	159,180	15,338.44
270	Kab. Lembata	202,339.87	1,608.22	40,640.34	48,567	10,683.78
271	Kab. Manggarai	1,149,025.64	14,619.39	47,516.76	237,078	16,136.42
272	Kab. Ngada	579,530.91	7,016.54	44,926.53	116,512	14,626.54
273	Kab. Sikka	1,045,038.56	9,012.75	18,702.39	133,376	13,133.84
274	Kab. Sumba Barat	347,705.53	5,229.46	53,261.65	188,248	17,911.94
275	Kab. Sumba Timur	808,271.24	34,987.04	52,089.58	108,258	17,501.59
276	Kab. Timor Tengah Selatan	1,263,155.28	2,837.58	22,857.34	178,335	16,214.95
277	Kab. Timor Tengah Utara	585,845.08	1,856.98	29,016.80	105,722	14,657.69
278	Kota Kupang	2,412,217.60	255,969.78	46,944.29	117,993	14,582.49
279	Kab. Rote Ndao	302,052.34	3,862.71	35,690.97	51,918	8,247.81
280	Kab. Manggarai Barat	524,809.80	3,151.10	13,754.07	89,583	9,657.55
281	Kab. Maluku Tenggara Barat	597,308.30	14,849.32	72,449.98	60,632	17,616.55
282	Kab. Maluku Tengah	753,090.38	5,969.53	122,633.38	126,693	43,905.66
283	Kab. Maluku Tenggara	458,370.39	46,465.79	48,506.94	51,162	27,841.24
284	Kab. Pulau Buru	374,162.51	1,309.75	61,838.68	52,107	26,421.00
285	Kota Ambon	2,089,100.34	454,792.38	27,314.33	106,259	21,625.15
286	Kab. Biak Numfor	947,471.49	11,523.19	55,233.00	43,470	36,322.80
287	Kab. Jayapura	1,008,532.21	57,271.80	50,835.40	36,553	45,928.84
288	Kab. Merauke	2,131,681.32	78,840.05	126,726.79	82,724	54,534.73
289	Kab. Nabire	1,302,940.96	84,057.66	41,096.89	69,821	44,364.43
290	Kab. Puncak Jaya	477,493.21	15,913.61	61,650.54	73,112	35,819.51
291	Kota Jayapura	3,239,843.62	243,496.16	26,138.71	36,553	47,390.37
292	Kota Ternate	517,921.16	367,890.10	44,199.64	68,262	33,109.49
293	Kab. Halmahera Timur	236,180.79	1,676.32	46,014.38	29,358	38,457.49
294	Kab. Halmahera Utara	499,340.02	9,116.03	19,000.25	79,086	23,728.13
295	Kota Tidore Kepulauan	259,804.74	3,379.83	20,167.36	30,631	17,710.02
296	Kab. Lebak	5,437,899.90	7,610.17	46,895.69	553,926	24,488.27
297	Kab. Pandeglang	4,757,188.74	23,694.50	32,448.81	486,008	19,583.76
298	Kab. Serang	12,603,637.47	159,052.28	82,513.86	766,158	58,366.73
299	Kab. Tangerang	27,571,752.61	6,611.36	296,803.68	656,428	274,347.95

300	Kota Cilegon	14,498,733.29	4,157.30	90,444.67	143,631	57,251.71
301	Kota Tangerang	35,604,678.01	30,461.53	222,318.53	656,428	185,254.83
302	Kab. Bangka	2,892,495.10	4,397.80	45,422.58	119,497	30,983.77
303	Kab. Belitung	1,747,656.65	11,337.56	37,026.00	67,031	30,892.11
304	Kota Pangkal Pinang	1,988,785.94	161,816.09	51,635.65	68,696	25,734.04
305	Kab. Bangka Selatan	1,996,874.11	3,345.03	50,204.89	67,921	32,168.34
306	Kab. Bangka Tengah	2,279,821.10	322.09	42,453.83	58,036	32,611.05
307	Kab. Boalemo	438,520.02	5,082.40	52,360.51	49,999	14,393.79
308	Kab. Gorontalo	1,025,925.12	13,606.25	28,559.55	179,914	15,204.72
309	Kota Gorontalo	846,915.51	187,709.45	36,862.51	67,620	10,893.10
310	Kab. Pohuwato	582,674.87	4,314.52	43,716.97	47,945	14,851.91
311	Kab. Natuna	5,624,937.78	1,650.04	93,241.19	37,875	301,040.15
312	Kab. Karimun	2,717,560.05	9,656.84	42,434.66	94,484	79,548.32
313	Kota Tanjung Pinang	2,998,281.39	28,057.87	41,009.66	73,408	69,178.50
314	Kab. Manokwari	1,391,354.05	166,652.40	70,363.17	66,025	80,984.12
315	Kab. Fak-Fak	800,291.33	21,945.75	43,119.77	24,261	37,427.02
316	Kab. Majene	716,403.09	38,601.31	40,071.80	49,333	16,853.30
<b>Total</b>		<b>2,065,290,886.07</b>	<b>17,321,617.67</b>	<b>19,219,775.57</b>	<b>87,635,079</b>	<b>23,183,066.13</b>

